

Jurnal Simki.
Economic



Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76. Mojoroto – Kota Kediri
Website : <https://jipred.org/index.php/JSE/>
Email : ojs.unpkediri@gmail.com



Jurnal Simki **Economic**

ISSN (Online): 2599-0748

Volume 5. Nomor 2. Halaman 106-207. Tahun 2022

Terbit dua kali setahun, berisi tulisan hasil karya ilmiah di bidang Ekonomi, Manajemen dan Kependidikannya.

Ketua Editor:

Erwin Putera Permana. Universitas Nusantara PGRI Kediri

Editor:

Dr. Maria Rio Rita, M.Si. Universitas Kristen Satya Wacana

Dr. H. Samari, MM. Universitas Nusantara PGRI Kediri

Assoc. Prof. Ronny Prabowo, P.hD. Universitas Kristen Satya Wacana

Dr. Mochamad Muchson, MM. Universitas Nusantara PGRI Kediri

Assoc. Prof. Dr. Tri Purwani, MM. Universitas AKI

Bambang Agus Sumantri. MM. Universitas Nusantara PGRI Kediri

Assoc. Prof. Dr. Kardison Lumban Batu, M.Si. Politeknik Negeri Pontianak

Dr. Hamzah Gunawan, MM. Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Setyoadi Pambudi, M.E. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Tjetjep Yusuf Afandi, MM. Universitas Nusantara PGRI Kediri

Reviewer:

Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev. MAPPI. Universitas Ahmad Dahlan

Hari Stiawan, S.E., M.Ak. Universitas Pamulang

Dr. Hilmi, S.E., M.Si. Universitas Malikussaleh

Dr. Nurlaila, S.S., M.Sas, Universitas Gunadarma

Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si. Universitas Syiah Kuala

Dr. Muammar Khaddafi, S.E., M.Si. Universitas Malikussaleh

Dr. Fachruzzaman SE., MDM., Ak., CA. Universitas Bengkulu

Dr. Heru Fahlevi, S.E., M.Sc. Universitas Syiah Kuala

Dr. Iskandar Muda, SE, M.Si, Ak, CA. Universitas Sumatera Utara

Prof. Yuliansyah, S.E., M.SA., Ph.D., Akt. Universitas Lampung

Hengki Mangiring Parulian Simarmata, S.Si., MM. Politeknik Bisnis Indonesia

Agus Sugiono, M.SA. Universitas Islam Madura

Susi Damayanti, S.Pd., MM. Universitas Nusantara PGRI Kediri

Edi Yanto, S.E., MM. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

Dr. Dini Yuniarti, S.E., M.Si. Universitas Ahmad Dahlan

Sekretariat:

Setyoadi Pambudi, M.E

Diterbitkan oleh : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Alamat Redaksi : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri 64112.
Website : <https://jipred.org/index.php/JSE>
Email : ojs.unpkediri@gmail.com



Volume 5. Nomor 2. Halaman 106-207. Tahun 2022

Daftar Isi

<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi Dewi Kusuma Wardani, Luthfia Dita Nistiana (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)</p>	106-118
<p>Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion Teguh Erawati, Riranti Desinta Pawestri (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)</p>	119-123
<p>Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dea Tunjung Sari, Rifki Khoirudin (Universitas Ahmad Dahlan)</p>	124-134
<p>Pengaruh Pemanfaatan Smartphone Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Srijaya Negara Palembang Leman Arahab, Erma Yulaini, Nova Pratiwi (Universitas PGRI Palembang)</p>	135-145
<p>Pengaruh K3 pada Perilaku Pekerja Konstruksi Di Pembangunan Gedung UM Buton La Sianto, Muhammad Chaidir Hajja (Universitas Muhammadiyah Buton)</p>	146-154
<p>Loyalitas Merek Milo Ditinjau dari Kualitas Produk dan Brand Image Ella Anastasya Sinambela, Rahayu Mardikaningsih (Universitas Sunan Giri Surabaya)</p>	155-164
<p>Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Arus Lalu Lintas Muhammad Chaidir Hajja (Universitas Muhammadiyah Buton)</p>	165-171
<p>Evaluasi Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Anna Atika Maghfiroh, Agus Sugiono (Universitas Islam Madura)</p>	172-186
<p>Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013 -2020 Syifa Fauziyyah, Naf'an Tarihoran, Dedi Sunardi (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten)</p>	187-198
<p>Implementasi Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Purbalingga Aning Fitriana (Universitas Perwira Purbalingga)</p>	199-207



Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Dewi Kusuma Wardani^{1*}, Luthfia Dita Nistiana²

d3wikusuma@gmail.com^{1*}, luthfia469@gmail.com²

^{1,2}Program Studi Akuntansi

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Received: 28 12 2021. Revised: 28 01 2022. Accepted: 10 02 2022.

Abstract : This study was conducted to test whether taxpayer compliance can be influenced by understanding tax regulations. This study was also conducted to determine whether there is a relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance moderated by risk preferences. The method used in this study was conducted using the convenience sampling method using a sample of 100 respondents from individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul. The data used in this study is primary data through a questionnaire containing the respondents' answers. The data analysis technique is path analysis/path analysis with understanding of tax regulations being the independent/independent variable and taxpayer compliance being the dependent/dependent variable, and risk preferences being the moderating variable. The results of the analysis show that taxpayer compliance is influenced by the understanding of tax regulations. In addition, risk preferences also affect the relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance. The implications of this study prove that understanding tax regulations is one element that has an important role in increasing individual taxpayer compliance at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul.

Keywords : Understanding taxation regulation, Taxpayer compliance, Risk preferences, Tax service office

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui apakah ada hubungan diantara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh preferensi risiko. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Teknik analisis datanya ialah *path analysis*/analisis jalur dengan pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel bebas/independen dan kepatuhan wajib pajak menjadi variabel terikat/dependen, serta preferensi risiko menjadi variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Selain itu, preferensi risiko juga berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan

dengan kepatuhan wajib pajak. Implikasi pada penelitian ini membuktikan bahwasannya pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

Kata Kunci : Pemahaman peraturan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Preferensi risiko, Kantor pelayanan pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan negara. Pajak juga dijadikan sebagai kunci keberhasilan bagi pemerintah untuk pembangunan pada masa mendatang. Masyarakat sebagai wajib pajak memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan sampai dengan mengumpulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Rusli, 2014).

Sumber pendapatan negara yang paling utama dan tinggi berasal dari pajak, seperti yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan tinggi. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara, semakin besar pula tuntutan dalam meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.425,4 triliun. Penerimaan pajak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp. 774,6 triliun yang terdiri dari penerimaan PPH Migas sebesar Rp. 655,3 triliun, PPH Non-Migas sebesar Rp. 97,7 triliun, dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 21,6 triliun.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat berperan penting pada tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh. Rendahnya tingkat pengendalian yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak yang melakukan kasus penyelewengan pajak (Asrianti, 2017). Mengubah sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. *Self assessment system* sudah ada dan diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 yang memberikan kepercayaan langsung kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang.

Keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya merupakan definisi dari kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010). Di Kabupaten

Bantul tingkat kepatuhan wajib pajaknya pada tahun 2018 mencapai 60%, beberapa desa yang ada di Kabupaten Bantul capaian pembayarannya masih dibawah 5%. Kurangnya sosialisasi, penagihan pajak yang belum maksimal, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) menjadi beberapa faktor yang menyebabkan capaian pembayaran pajak masih dibawah rata-rata, tetapi kesadaran untuk membayar pajak menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul (Hasanudin, 2018). Indonesia yang menganut *self assessment system* dimana secara mutlak wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak terutangnya, dan melaporkan sendiri kewajibannya, menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai aspek yang paling penting.

Cara seorang wajib pajak dalam hal memahami peraturan pajak yang ada merupakan definisi dari pemahaman peraturan perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Masyarakat yang belum paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum yakin dengan undang-undang perpajakan (Agustiantono, 2012). Banyak wajib pajak yang masih tidak paham mengenai peraturan perpajakan menjadi fenomena yang masih terjadi saat ini. Memahami secara penuh mengenai peraturan perundang-undangan pajak, cara mengisi formulir pajak, menghitung pajak, cara melaporkan SPT, serta tidak terlambat dalam membayar pajak merupakan faktor yang dapat membuat wajib pajak dikatakan patuh. Dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak taat cenderung belum paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pemahaman peraturan pajak, maka semakin tinggi juga pemahaman seorang wajib pajak terhadap sanksi-sanksi yang akan diterima apabila tidak mematuhi kewajibannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi wajib pajak didalam memahami peraturan perpajakan. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan perpajakan bisa disebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak tinggi maka dapat dikatakan berpengaruh terhadap pemahamn waib pajak tentang peraturan

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang cenderung berani menghadapi risiko yang ada merupakan seorang wajib pajak yang memiliki preferensi risiko yang tinggi. Semakin tinggi tingkat preferensi risiko maka akan semakin tinggi juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat preferensi risiko maka akan semakin rendah juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak..

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perbedaan dari masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik menarik untuk diteliti kembali. Kepatuhan wajib pajak di kota Bantul yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah dapat memperkuat moderasi hubungan yang ada antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah pemahaman peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu, pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Teknik *convenience sampling* adalah metode yang digunakan oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak di kota Bantul.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel bebas (X), kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y), dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (Z). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010). Definisi kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh adalah taat dalam melakukan segala ketentuan yang terkait dengan aturan perpajakan yang harus atau wajib dilaksanakan (Aryobimo, 2012). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dan kemudian menerapkannya dalam kegiatan perpajakannya seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya.

Hardiningsih & Yulianawati (2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib yang pajak paham mengenai tata cara perpajakan cenderung paham mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan pajak. Kumpulan dari beberapa teori merupakan salah satu komponen dari preferensi risiko seseorang yang memiliki hubungan dalam pengambilan keputusan seseorang tersebut. Jadi kepatuhan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko, jika tingkat preferensi risiko wajib pajak tersebut tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini diolah menggunakan Statistical Program for Social Sciences (SPSS) versi 20. Berikut merupakan hasil olah data dari 100 responden. Hasil Analisis Statistik Deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pertanyaan kuesioner. Berikut tabel analisis deskriptif:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)	100	32	52	42.22	4.066
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	29	36	35.91	3.701
Preferensi Risiko (Z)	100	17	44	27.29	4.176
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah data (N) adalah sebesar 100. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) memiliki rata-rata sebesar 42.22 dengan standar deviasinya sebesar 4.066. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki rata-rata sebesar 35.91 dan standar deviasinya sebesar 3.701 dan Preferensi Risiko (Z) memiliki rata-rata sebesar 27.29 dan standar deviasinya sebesar 4.176.

Model pengujian data yang digunakan adalah Uji validitas ini dipakai untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencari korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor masing-masing variabel dan korelasinya dibandingkan dengan nilai signifikan > 0.05 (r hitung $> r$ tabel), maka data tersebut valid begitupun sebaliknya. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100

responden. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dalam pengujian uji validitas dengan 100 responden:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket.
1	0.591	0.1966	Valid
2	0.634	0.1966	Valid
3	0.606	0.1966	Valid
4	0.495	0.1966	Valid
5	0.512	0.1966	Valid
6	0.576	0.1966	Valid
7	0.426	0.1966	Valid
8	0.388	0.1966	Valid
9	0.547	0.1966	Valid
10	0.639	0.1966	Valid
11	0.524	0.1966	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)			
Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket.
12	0.552	0.1966	Valid
13	0.551	0.1966	Valid
14	0.435	0.1966	Valid
15	0.580	0.1966	Valid
16	0.583	0.1966	Valid
17	0.434	0.1966	Valid
18	0.258	0.1966	Valid
19	0.495	0.1966	Valid
20	0.490	0.1966	Valid
21	0.525	0.1966	Valid
22	0.557	0.1966	Valid
23	0.483	0.1966	Valid
24	0.437	0.1966	Valid
Preferensi Risiko (Z)			
Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket.
41	0.638	0.1966	Valid
42	0.647	0.1966	Valid
43	0.529	0.1966	Valid
44	0.615	0.1966	Valid
45	0.719	0.1966	Valid
46	0.668	0.1966	Valid
47	0.691	0.1966	Valid
48	0.732	0.1966	Valid
49	0.526	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *pearson correlation* > r-tabel diatas 0.50.

Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Apabila jawaban seorang individu terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal. Suatu kuesioner juga dikatakan reliabel apabila jawaban dalam kuesioner tersebut stabil dari awal sampai akhir serta memberikan nilai alpha > 0,60.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	33

Berdasarkan hasil dari tabel 3, menunjukkan bahwa *Croanbach Alpha* atau nilai koefisien alpa reliabilitas sebesar 0.875, hal ini menunjukkan bahwa *Croanbach Alpha* > 0.60. kesimpulannya adalah data yang digunakan dinyatakan reliabel sehingga data tersebut dapat dilakukan uji selanjutnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel apakah berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5%. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Hasil pengujian normalitas memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.80620256
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.057
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.653
Asymp. Sig. (2-tailed)		.787
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0.653 dan nilai signifikansinya sebesar 0.787 > nilai

α yaitu 0.05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent*). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* umum dipakai dalam menunjukkan adanya multikolinieritas, yaitu nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pemahaman Peraturan Perpajakan	.507	1.971

Dependent variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 5 dapat dilihat bahwa *tolerance* pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan mempunyai hasil nilai VIF berada dibawah 10, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak ada korelasi sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah dengan menguji *Glejser*. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.538	1.941		.793	.430
PPP	.070	.060	.164	1.157	.250

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan program IBM SPSS versi 20, disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedasitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang didapat diatas 0.05. Berdasarkan tabel 6 diatas, nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0.250.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yang secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat/dependen secara signifikan atau positif. Nilai yang

dihasilkan signifikan atau positif apabila nilai probabilitas < 0.05 . hasil dari penelitian ini dalam menguji uji F sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	541.991	1	541.991	65.236	.000 ^b
1 Residual	814.199	98	8.308		
Total	1356.190	99			

a. Dependent Variable: Total Y

b. Predictors: (Constant), Total X

Tabel 7 di atas menjelaskan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Secara simultan atau bersama-sama variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) berpengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung sebesar 65.236. Apabila nilai F hitung $> F$ tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan. F hitung $65.236 > F$ tabel 2.70 sehingga dengan kata lain model dalam penelitian ini fit.

Uji determinasi digunakan sebagai uji untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Presentase yang dinilai berkisar $0 < R^2 < 1$. Hasil yang dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.400	.384	2.88239

a. Predictors: (Constant), Total X

Tabel 8 menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai *R square* adalah 0.400. Hal ini menunjukkan bahwa 40% variabel pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan untuk 60 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai statistik $t >$ nilai t tabel, maka hal ini hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima. Berikut hasil uji t dalam penelitian ini:

Tabel 9. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.618	3.021		3.845	.000
	X1	.575	.071	.632	8.077	.000

a. Dependant Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar $0.000 < 0.05$ dengan t hitung $8.077 > t$ tabel 1.984 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan diterima dan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak. Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel preferensi risiko atas pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dua. Analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pengujian Regresi Dengan Nilai Selisih Mutlak. Koefisien Determinasi (R^2).

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.688 ^a	.473	.456	2.72938

a. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore: X1, Zscore: Z

Pada tabel 10 merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0.456 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko, dan moderasi1 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45.6% sedangkan sisanya sebesar 54.4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	641.038	3	213.679	28.684	.000 ^b
Residual	715.152	96	7.449		
Total	1356.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore: X1, Zscore: Z

Tabel 11 merupakan hasil uji fit model yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 28.684 dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko, dan moderasi1 secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	34.738	.427	81.410	.000
Zscore: X1	1.366	.401	.369	3.404
Zscore: Z	.705	.343	.191	2.056
Moderasi1	1.404	.497	.256	2.827

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tabel 12 menunjukkan bahwa secara individu variabel pemahaman peraturan perpajakan nilai koefisiennya sebesar 1.366 dengan nilai sig sebesar 0.001. Variabel preferensi risiko nilai koefisiennya sebesar 0.705 dengan nilai sig sebesar 0.100. Variabel moderasi1 memiliki nilai sig 0.06 lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memperkuat moderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

SIMPULAN

Didasarkan pada hasil dan pembahasan tersebut diatas, akhirnya bisa ditemukan dan ditarik kesimpulan yaitu meliputi: *pertama*, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat. *Kedua*, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko. Dimana jika tingkat preferensi risiko seorang wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kemudian Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pengumpulan data yaitu berupa pengumpulan data dengan wawancara. Hal tersebut agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih nyata dan dapat keluar dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit/kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustiantono, D. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. 1–72.
- Aryobimo, P. T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Asrianti. (2017). *Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. 53(9), 1689–1699.
- Aziz, M. A. A., Ask, N. S., & Affifudin. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. 66, 37–39.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hasanudin, U. (2018). *Tagihan PBB-P2 Jadi Temuan BPK*. [https://yogyakarta.bpk.go.id/tagihan-pbb-p2-jadi-temuan-bpk/#:~:text=Piutang PBB-P2 tersebut menjadi,setiap tahun sejak 2013 lalu.&text=Ediastuti mengatakan piutang PBB-P2,Pelayanan Pajak \(KPP\) Pratama](https://yogyakarta.bpk.go.id/tagihan-pbb-p2-jadi-temuan-bpk/#:~:text=Piutang PBB-P2 tersebut menjadi,setiap tahun sejak 2013 lalu.&text=Ediastuti mengatakan piutang PBB-P2,Pelayanan Pajak (KPP) Pratama).
- Ismawati, E. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. 5(1), 1–8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Semarang , Universitas Diponegoro*.
- Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1).

- Liana. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Lubab, M. A., & Ghozali, I. (2016). *Sikap Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang: Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. <http://eprints.undip.ac.id/48962/>
- Nurmantu, safri. (2010). Pengantar perpajakan. *Pengantar Perpajakan*.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Sulistiyani, A. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di Kpp Pratama Semarang Barat)*. UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.
- Suntono, S. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak)*. UNIVERSITAS STIKUBANK.
- Susanti, Y. N. (2017). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus UKM di Kecamatan Semarang Selatan)*. UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.



Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evaison*

Teguh Erawati¹, Riranti Desinta Pawestri^{2*}

eradimesiarch@gmail.com¹, sintaira01@gmail.com^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Received: 29 01 2022. Revised: 02 02 2022. Accepted: 14 02 2022.

Abstract : Tax is a mandatory public contribution to state revenues based on the law (can be imposed) by not receiving reciprocal services (contra-achievements) that can be directly shown and which can be used to pay for general state expenditures. This study aims to prove the effect of applying the Self Assessment Tax System to tax evasion actions. This research is motivated by the many cases that occur in this country regarding public actions and the lack of public awareness related to the level of compliance in taxation which is often a burden for taxpayers because it will reduce income so many taxpayers want low tax payments through tax avoidance. (tax avoidance) and acts of tax evasion (tax evasion). This study uses a descriptive or explanatory research method that uses a quantitative approach. The population of this study is all individual taxpayers (WPOP) registered with the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul. The samples taken in this study were individual taxpayers, other professional freelancers and entrepreneurs who were registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul. Sampling was done using random sampling method. The results of this study can be concluded that the variable Self assessment system and tax audit has no effect on tax evasion.

Keywords : Self assessment system, Tax audit, Tax evasion.

Abstrak : Pajak adalah iuran wajib masyarakat terhadap penerimaan negara berdasarkan undang-undang (dapat dikenakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik (contra-achievement) yang dapat langsung ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *Self Assessment Tax System* terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang terjadi di negeri ini mengenai tindakan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kepatuhan dalam perpajakan yang seringkali menjadi beban bagi wajib pajak karena akan mengurangi pendapatan sehingga banyak wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang rendah melalui penghindaran pajak. (penghindaran pajak) dan tindakan penghindaran pajak (tax evasion). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif atau explanatory research yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi, pekerja lepas profesional lainnya dan pengusaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Bantul. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel *Self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Self assessment system*, Pemeriksaan pajak, Penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat serta mengangkat harkat dan martabat bangsanya melalui pemerataan pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara terus menerus menggali sumber-sumber pendapatan baru dan tidak lupa untuk meningkatkan segala sumber daya serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang sudah ada. Salah satu sumber penerimaan yang paling berpotensi dalam menambah penerimaan negara adalah penerimaannya dalam sektor perpajakan. Pajak adalah pungutan/iuran wajib pada Negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. (Fatimah & Wardani, 2017) menjelaskan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh adanya kecurangan pajak. Kecurangan pajak merupakan hal yang sangat serius di Indonesia dan sering dijumpai dalam administrasi perpajakan salah satunya yaitu penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) mengacu pada tindakan membayar pajak lebih sedikit daripada yang harus dibayar. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak diduga ketika mereka percaya bahwa uang publik tidak dialokasikan secara efisien dari pemerintah kepada warga.

Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya, dan untuk menguji apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan masalah atau topik yang sama serta yang berkaitan dengan pembahasan dari masalah ini yaitu mengenai penerapan *Money Etchis* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu yang pertama *behavioral beliefs* (keyakinan berperilaku), *normative beliefs* (keyakinan normative), dan *control beliefs* (control keyakinan) (Cruz, Leonel da, 2015). Dapat disimpulkan bahwa sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, akan secara langsung memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan dalam melakukan tindakan yang melanggar

hukum seperti penggelapan pajak ini akan dianggap salah. *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori ini ada 3 (tiga) faktor yang dapat menentukan seseorang untuk berperilaku yaitu *Behavioral beliefs* (keyakinan berperilaku), *normative beliefs* (keyakinan normatif), dan *control beliefs* (control keyakinan). Kesadaran wajib pajak dengan adanya penerapan *self assessment system*, dapat mendorong dan memotivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, setelah wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan membayar pajak dengan patuh maka perilaku tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Self Assessment System merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak. *Self assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kekuasaan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya tentunya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Rahayu, 2013, p. 102) menjelaskan bahwa *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya *tax evasion* yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah. Penelitian yang dilakukan (Kurniati Herlangga & Pratiwi, 2018) mengatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka hipotesis yang diajukan ialah: H1: *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Metodologi menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis. Sifat penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif atau penjelasan (*explanatory research*) yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fenomena atau gejala untuk

meneliti suatu populasi dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu dengan analisis data bersifat statistik.

Adapun indikator dari penelitian ini adalah a) *Self Assessment System* (Mendaftar dan mengisi formulir SPT, Menghitung pajak sendiri, Membayar pajak tepat waktu, Pelaporan tepat waktu (Wahyuni, 2017). b) *Tax Evasion* (Tidak menyampaikan SPT, Menyampaikan SPT dengan tidak benar, Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP, Tidak menyetorkan Pajak, Menyuap fiskus (Suandy, 2014)d

Sampel dalam penelitian ini ialah sebagian dari populasi sebanyak ±50.000 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling*, yaitu dengan kriteria wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat didapat sampel sejumlah 100 responden. Penelitian ini memakai sumber data primer yang diperoleh peneliti langsung dari pihak pertama yaitu jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan kepada responden Supriyono (2016). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil pengujian H1

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,090	5,940		,520	,604
<i>Self Assessment System</i>	,361	,208	,172	1,737	,086

a. Dependent Variable: TOTALY

Hasil pengujian H1 menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,361 serta t hitung sebesar 1,737 > 1,661 dan nilai signifikansi 0,086 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 tidak terdukung atau dapat diartikan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin wajib pajak tidak melaksanakan *self assessment system* dengan benar maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan (Friskianti, 2014) yang menyatakan bahwa *self assessment system* secara persial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pengujian hipotesis pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bantul yaitu bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. *Self assessment system* sendiri merupakan system pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri secara mandiri. *Theory of Planned Behavior* yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden dapat disimpulkan bahwa semakin wajib pajak tidak melaksanakan *self assessment system* dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak, sehingga *self assessment system* tidak terdukung.

DAFTAR RUJUKAN

- Cruz, Leonel da, N. W. S. S. dan N. N. K. Y. (2015). *Aplikasi Theory of Planned Behavior dalam Membangkitkan Niat Berwirausaha Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpaz, Dili Timor Lest. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 12, 895–920.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG. *Akuntansi Dewantara*, 4(1).
- Friskianti, Y. (2014). *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. 3(4), 543–552.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di kpp pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal*, 28, 1–18.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak., Edisi 5*. Selemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2016). *Akuntansi keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Wahyuni, N. (2017). PENGARUH KESEHATAN KEUANGAN BANK TERHADAP NILAI INVESTASI MASYARAKAT DALAM SAHAM BANK. *Jurnal Riset Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/jra.v5i2.512>



Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dea Tunjungsari^{1*}, Rifki Khoirudin²

deatunjung@gmail.com^{1*}, rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan

Received: 23 01 2022. Revised: 11 02 2022. Accepted: 21 02 2022.

Abstract : This research was conducted to determine the effect of Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Population Amounts on Capital Expenditures in the Special Province of Yogyakarta in 2011-2017. Law No. 22 of 1999 concerning Regional Government is a juridical basis for regional economic development in Indonesia. The locations in this study are districts and cities in the Special Province of Yogyakarta. Capital expenditure is an output that greatly affects development. Because capital expenditure is a fixed asset and has long-term benefits, it makes capital expenditure a reference for improving development and increasing people's purchasing power. Research data in the form of secondary data. The results of the study show that Regional Original Income and Population Influence on Capital Expenditures in the Special Province of Yogyakarta. While the General Allocation Fund and Special Allocation Funds have no effect on Capital Expenditures in the Special Province of Yogyakarta.

Keywords : Capital expenditures, Local revenue, Population amounts

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah mengetahui variabel yang mempengaruhi belanja modal. Variabel tersebut berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Jumlah Penduduk. Adapun fokus lokasi penelitian ini dilakukan di DIY tahun 2011-2017. Belanja modal merupakan aset tetap yang memiliki nilai serta manfaat jangka panjang dan merupakan output yang sangat mempengaruhi pembangunan. Belanja modal digunakan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pembangunan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana data skunder diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Hasilnya menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi belanja modal adalah PAD dan Jumlah Penduduk, sedangkan belanja modal tidak dipengaruhi oleh variabel DAU dan DAK.

Kata Kunci: Belanja modal, Pendapatan asli daerah, Jumlah penduduk

PENDAHULUAN

Di zaman pembaharuan, pemerintahan melaksanakan perubahan-perubahan pokok serta mendasar, dengan tujuan memperbaiki kelemahan maupun kekurangan dan melakukan upaya mengakomodasikan berbagai tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang

semakin berkembang, antara lain ditetapkannya pemerintahan yang demokratis dan pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi untuk masing-masing daerah yang digunakan untuk mengelola serta mengatur pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat serta peraturan perundang-undangan yang ada. Otonomi tersebut berasal dari Pemerintah Pusat kemudian diberikan kepada masing-masing daerah agar dilaksanakan secara luas, nyata, bertanggung jawab, dan berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Dalam era otonomi daerah tersebut, peran Belanja Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian, karena Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukannya. Jika Belanja Modal digunakan secara efektif dan efisien serta menghasilkan manfaat yang tertinggi, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Penjelasan tentang otonomi daerah tercantum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Penjelasan tersebut berisi landasan yudiris bagi penembangan ekonomi daerah di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, potensi daerah dan keanekaragaman daerah dalam pelaksanaan pengembangan otonomi di daerah kabupaten dan kota harus diperhatikan. Dalam era otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah akan lebih besar, sehingga diharapkan daerah dapat mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Bagi daerah yang mempunyai potensi pendapatan yang besar, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang positif, akan tetapi disisi lain bagi daerah yang masih relatif kecil pendapatannya akan dituntut untuk lebih mandiri (RI, 1999).

Salah satu cara pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan pembangunan daerah. Adanya hal tersebut diarahkan untuk membangun di seluruh bidang dan sektor yang merupakan perwujudan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945) terutama dalam memenuhi hak masyarakat. Tujuan dari pengembangan otonomi daerah diantaranya yaitu untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kreativitas, meningkatkan keikutsertaan warga, dan meningkatkan adanya peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara pada (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010) dijelaskan mengenai belanja modal. Manfaat anggaran belanja modal pemerintah dijelaskan secara rinci, dimana manfaat lebih dari satu tahun anggaran dapat meningkatkan kekayaan ataupun aset daerah dan dapat meningkatkan belanja yang bersifat rutin. Selain itu belanja modal dapat digunakan untuk infrastruktur, perlengkapan, serta aset tetap.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih tergolong rendah, dimana belanja modal untuk provinsi di Pulau Jawa sudah tergolong tinggi (Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun penelitian ini dilakukan dari tahun 2011-2017 dikarenakan data sebelum tahun 2011 belum tersedia dan data tahun 2018 belum tersedia. Hasil penelitian serupa yang dilakukan masih menghasilkan hasil beragam. Penelitian yang dilakukan (Pelealu, 2013) di pemerintah Kota Manado menerangkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh PAD dan DAK dengan hasil positif dan signifikan. Penelitian (Devita, *et.al*, 2014) menghasilkan temuan yang sama, dimana PAD dan DAU memiliki hubungan signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Penelitian (Askam, 2008) memiliki hasil yang sama, alokasi belanja modal pemerintah dipengaruhi secara positif oleh PAD, DAU dan DAK. Penelitian tersebut dilakukan pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sementara pada penelitian (Juniawan & Suryantini, 2018), melakukan pengujian yang sama pengaruh PAD, DAU dan DAK, menghasilkan hubungan positif untuk alokasi belanja modal di Provinsi Bali. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian dari (Juniawan & Suryantini, 2018), mereka melakukan penelitian di Aceh mengenai hubungan PAD dan DAU terhadap belanja modal. Hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan positif PAD, sementara DAU memiliki hubungan negatif dengan belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara penelitian (Adyatma & Oktaviani, 2015).

Belanja modal termasuk belanja langsung yang dipakai dengan tujuan pembiayaan yang menambah aset atau investasi (Mardiasmo, 2018). Lebih lanjut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan, bahwa belanja modal yaitu golongan belanja langsung yang dipakai dalam pembiayaan investasi (menambah aset). Sedangkan menurut (Halim & Kusufi, 2017) belanja modal adalah penggunaan anggaran belanja guna memperoleh harta tetap serta harta lainnya, dimana harta tersebut memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Boediono, 1999) menjelaskan bahwa pemakaian anggaran dilakukan untuk membeli, mengadakan atau membangun harta tetap berwujud dimana pemakaian anggaran yang dipakai dalam kegiatan pemerintahan yang nilai dan manfaatnya dapat digunakan dalam jangka waktu lebih besar dari satu tahun merupakan belanja modal.

Belanja modal tidak hanya pemakaian dalam rangka pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pemakaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan dengan sifat menambah dan mempertahankan masa manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Dalam hal pemanfaatan Belanja Modal, akan sangat penting memperhatikan

dari kegiatan perencanaan dalam Belanja Modal, karena agar supaya tidak terjadi inefisiensi anggaran, dan ketidaktepatan dalam belanja barang tersebut. Untuk itu sebaiknya sebelum dilakukan kegiatan tersebut, diharapkan ada perencanaan yang matang, sehingga manfaatnya dapat memberikan multiplier efek yang besar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menunjang kemandirian daerah tersebut yang pada akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut meningkat.

Hasil dari penerimaan ekonomi asli daerah adalah PAD (Halim & Kusufi, 2017). Sumber penerimaan daerah termasuk salah satu aspek yang berpengaruh dalam belanja modal merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya PAD tersebut dapat digunakan sesuai potensi yang ada di daerah. Sementara menurut (Boediono, 1999), penerimaan daerah yang diperoleh sesuai dengan peraturan daerah adalah PAD. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD bersumber dari potensi daerah yang kemudian dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

Menurut (Dinar & Hasan, 2018), dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BN), selanjutnya diberikan kepada daerah dalam bentuk *block grant*, yang pemakaiannya digunakan daerah disebut Dana Alokasi Umum (DAU). Lebih jauh dijelaskan tentang tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh (Mardiasmo, 2018). Terdapat ketimpangan keuangan, yaitu antara pusat dan daerah, oleh karenanya tujuan DAU adalah menjaga pemerataan dan keseimbangan keuangan, sehingga ketika pembagian Dana Alokasi Umum perlu mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki, serta memperhatikan pembiayaan dalam mendukung kegiatan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Selain itu DAU memiliki fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal.

Selain bersumber dari DAK, belanja modal pemerintah daerah juga diperoleh dari DAU, akan tetapi dana tersebut berasal dari pemerintah pusat. Adapun faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) serta potensi daerah (*fiscal capacity*). Adapun prinsip pengalokasian dana DAU yaitu dengan memperhatikan potensi daerah. Daerah yang berpotensi fiskal tinggi namun kebutuhannya rendah akan mendapatkan Dana Alokasi Umum cenderung sedikit. Daerah akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum cenderung tinggi jika potensi daerah rendah namun kebutuhannya tinggi.

APBN yang digunakan untuk Pemerintah kabupaten/ kota guna pembiayaan terhadap kebutuhan tertentu yang memiliki sifat khusus, sesuai ketersediaan dana APBN diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (M. Suparmoko, 2002). Tujuan dari pengalokasian Dana

Alokasi Khusus adalah untuk membantu dalam pembiayaan yang dibutuhkan atas suatu kegiatan yang termasuk bagian dari urusan daerah dengan prioritas nasional, terutama biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang belum memenuhi kriteria atau guna mempercepat pembangunan daerah (Boediono, 1999). Adapun kriteria yang harus dicapai dalam memperoleh DAK yaitu, daerah wajib memiliki kriteria umum, khusus dan teknis.

Semua orang yang berada dan tinggal di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih disebut penduduk. Sedangkan Pertumbuhan penduduk adalah kondisi perkembangan yang mengalami peningkatan serta penurunan jumlah penduduk. Untuk sistem pencatatan kependudukan yang ada saat ini, kecil kemungkinan bagi penduduk akan tercatat pada lebih dari satu daerah. Hal ini dikarenakan kemajuan system informasi di bidang kependudukan dan adanya KTP elektronik yang digunakan sekarang, sehingga jumlah penduduk akan lebih dapat dipercaya. Indonesia kedepannya diperkirakan akan mengalami ledakan jumlah penduduk yang akan lebih baik diantisipasi supaya tidak menimbulkan efek negatif.

Migrasi berkembang dikarenakan pendapatan yang berbeda di perdesaan dan perkotaan (Todaro, 2008). Dalam pembangunan ekonomi, faktor yang terpenting adalah sumber daya manusia. Penggunaan secara tepat sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengendalian berkembangnya penduduk serta mampu dimanfaatkan dengan baik jika jumlah penduduk mampu diatasi serta dikurangi. Menurut (Boediono, 2014) menyatakan bahwa penduduk yang meningkat dapat memperbanyak jumlah tenaga kerja yang mampu menambah produksi, jika pertumbuhan diiringi dengan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Peningkatan produksi dapat lebih cepat daripada peningkatan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat kuantitatif, dengan sumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan untuk jumlah penduduk didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada metode *common effect model* (CEM) menggunakan model estimasi dalam regresi data

panel metode ini juga disebut dengan *Pooled Least Square*. *Ordinary Least Square* atau kuadrat terkecil masih digunakan dalam model *common effect*. Variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen, apabila *p-value* kurang dari batas kritis, yaitu pada nilai 0,05.

Asumsi dari model *fixed effect* dilihat dari parameter α . Efek individu yang tercermin dari parameter α mempunyai nilai tertentu yang tetap pada setiap individu namun setiap individu mempunyai parameter slope tetap. Adapun nilai α berbeda pada setiap individu, sedangkan β sama untuk semua individu. *Common effect* memiliki perbedaan dengan *random effect* model, perbedaan tersebut karena REM tidak menggunakan *Ordinary Least Square*, namun menggunakan *maximum likelihood* atau *general least square*. Apabila nilai *p-value* kurang dari batas kritis, yaitu 0,05 yang artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila *p-value* lebih dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menentukan model estimasi regresi data panel, maka dilakukan pengolahan data dengan *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)*. Kemudian dalam menentukan model terbaik yang akan digunakan, dilakukan uji chow dan uji hausman. Pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari pengolahan berbagai model :

Tabel 1. Pendekatan *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
PAD?	0.231993	0.049747	4.663414	0.0001
DAU?	0.289148	0.054283	5.326644	0.0000
DAK?	0.200760	0.110066	1.823991	0.0778
JP?	-126.0616	45.57108	-2.766263	0.0095
R-Squared		0.771258		
Adjusted R-Squared		0.749121		

Dari model *common effect* tersebut, diketahui bahwa R-Squared sebesar 0.771258 yang berarti variabel penelitian yang digunakan memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebesar 77.1258 persen dan sisanya 22.8742 atau sebesar 2287.42 persen tidak dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Pendekatan *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-5.89E+08	1.93E+08	-3.053425	0.0052
PAD?	0.490306	0.095667	5.125109	0.0000
DAU?	0.216054	0.115484	1.870860	0.0727

DAK?	0.052335	0.091282	0.573339	0.5713
JP?	669.3393	309.0332	2.165914	0.0397
Fixed Effect (Cross)				
_BANTUL—C	-1.35E+08			
_KULONPROGO—C	2.86E+08			
_YOGYA—C	1.67E+08			
_GUNUNGKIDUL--C	56628573			
_SLEMAN—C	-3.75E+08			
R-Squared		0.905153		
Adjusted R-Squared		0.875969		

Dari model *fixed effect* tersebut, diketahui bahwa R-Squared sebesar 0.905153 yang berarti variabel penelitian yang digunakan memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebesar 90.515 persen dan sisanya 0.094847 atau sebesar 9.487 persen tidak dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3. Pendekatan *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-1.31E+08	30948014	-4.243330	0.0002
PAD?	0.211698	0.035304	5.996407	0.0000
DAU?	0.534040	0.069192	7.718254	0.0000
DAK?	0.046544	0.085499	0.544373	0.5902
JP?	-179.3423	34.41463	-5.211223	0.0000
Random Effect (Cross)				
_BANTUL—C	1.74E-05			
_KULONPROGO—C	2.98-05			
_YOGYA—C	-2.08E-05			
_GUNUNGKIDUL--C	-1.83E-05			
_SLEMAN—C	-8.00-06			
R-Squared		0.836943		
Adjusted R-Squared		0.815202		

Hasil *random effect* menunjukkan bahwa R-Squared sebesar 0.836943 yang berarti variabel yang mempengaruhi belanja modal adalah variabel penelitian yang digunakan, dimana nilai pengaruh tersebut sebesar 83.6943 persen dan sisanya tidak dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini sebesar 16.3057 atau sebesar 1630.57 persen.

Tabel 4. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	4.674517	(4,26)	0.0056
Cross-section Chi-Square	18.964181	4	0.0008

Tujuan dilakukan Uji Chow adalah untuk menetapkan model yang digunakan, apakah *common effect* atau *fixed effect*. H0 : *Common effect*. H1 : *Fixed effect*. Membandingkan f-statistik dengan f-tabel. f-hitung > f-tabel : H0 ditolak. f-hitung < f-tabel : H0 diterima.

Diketahui f hitung = 4,674517. f -tabel = 2,74. f -tabel 2,74 diperoleh dari df (4,26), α = 5%. Jadi, f -hitung > f -tabel, maka H_0 ditolak yang berarti model yang digunakan *fixed effect*.

Tabel 5. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	18.698068	4	0.0009

Tujuan dilakukan Uji Hausman adalah untuk menetapkan model yang akan digunakan, apakah *fixed effect* atau *random effect*. H_0 : *Random Effect Model*. H_1 : *Fixed Effect Model*
Chi-square statistic > *chi*-tabel maka menolak H_0 , *chi-square* statistic < *chi*-tabel maka menerima H_0 . Diketahui *Chi-square* statistik = 18,698068. *Chi*-tabel = 9,48. *Chi*-tabel 9,48 diperoleh dari df (4), α = 5%. Hasil ini menunjukkan nilai *chi-square* statistik > *chi*-tabel, oleh karena itu H_0 ditolak, artinya model terbaik yang digunakan adalah *fixed effect*. Dari pengujian Uji Chow dan Uji Hausman, maka diperoleh hasil yang digunakan yaitu model *fixed effect* dengan variabel yang signifikan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk.

Tabel 6 Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-5.89E+08	1.93E+08	-3.053425	0.0052
PAD?	0.490306	0.095667	5.125109	0.0000
DAU?	0.216054	0.115484	1.870860	0.0727
DAK?	0.052335	0.091282	0.573339	0.5713
JP?	669.3393	309.0332	2.165914	0.0397
Fixed Effect (Cross)				
_BANTUL—C	-1.35E+08			
_KULONPROGO--C	2.86E+08			
_YOGYA—C	1.67E+08			
_GUNUNGKIDUL--	56628573			
C				
_SLEMAN—C	-3.75E+08			

Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, untuk mengetahui variabel apa saja yang signifikan maka dilakukan dengan melihat nilai t -hitung dan nilai t -tabel dan probabilitas dari masing-masing variabel independen. Membandingkan nilai t -hitung dan nilai t -tabel. Apabila t -hitung > t -tabel maka dikatakan signifikan. Perhitungan t -tabel sebagai berikut : $df = n-k$, α . $df = 35-5$, 5%. $df = 30$, 5%. $df = 1.645$

Dengan melihat dari hasil perbandingan nilai t -hitung dengan nilai t -tabel, maka variabel yang signifikan yaitu variabel PAD, DAU dan Jumlah Penduduk. Membandingkan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka dikatakan signifikan. Berdasarkan hasil olahan tersebut, maka variabel yang signifikan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan jumlah penduduk (JP). Dengan melakukan perbandingan t.hitung dengan t.tabel dan membandingkan nilai probabilitas, maka variabel yang signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk (JP). Hasil pengolahan menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu belanja modal tertinggi ada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebesar $2.86E+08$ atau 0,00000286. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar $-3.75+08$ atau 0,00000375.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pada tahun 2011-2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM). Hasil tersebut tercermin dari nilai t-hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t-tabel yaitu $5.125109 > 1.64$ sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu $0.0000 < 0.05$. Nilai t-hitung untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 1.870860 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1.645, dimana nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel, hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Belanja Modal (BM) di DIY tahun 2011-2017 dengan nilai probabilitas $0.0727 > 0.05$. Hasil yang sama ditunjukkan oleh hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM) di DIY tahun 2011-2017. Dimana nilai t-hitung sebesar 0.573339 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.645 dengan nilai probabilitas $0.5713 > 0.05$ yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Sementara hubungan antara variabel jumlah penduduk (JP) dengan Belanja Modal (BM) di DIY tahun 2011-2017 menunjukkan hasil signifikan. Dengan nilai t-hitung 2.165914 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.645. Nilai probabilitas $0.0397 < 0.05$.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dengan adanya pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Belanja Modal, dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah, akan berbanding dengan semakin besar Belanja Modal. Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah harus mengupayakan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus. Misalnya dengan cara mengefektifkan pajak, retribusi, meningkatkan penyuluhan pajak, pengawasan serta pelayanan pajak. Jumlah penduduk memiliki pengaruh pada Belanja Modal yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka belanja modal semakin besar. Sehingga diharapkan untuk Pemerintah mampu meningkatkan kualitas manusia, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Akan tetapi jumlah penduduk merupakan suatu konsekuensi, jika jumlah penduduk semakin banyak dapat ditekan dengan program Keluarga Berencana (KB).

DAFTAR RUJUKAN

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Askam, T. (2008). PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2).
- Boediono. (1999). Seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi no. 2 : Ekonomi Makro. In *BPFE*.
- Boediono. (2014). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu EKonomi. *BPFE*.
- Devita Andri, Arman Delis, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 2 (2).
- Dinar, & Hasan. (2018). Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi. In *CV. Nur Lina* (Issue 1980).
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3).
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- M. Suparmoko. (2002). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. In *Monograf*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Pelealu, A. (2013). PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2003-2012. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2892>

- Republik Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen IV). *Wikisource Bahasa Indonesia, Perubahan IV*.
- RI, D. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. *UU No. 22 1999, 1*.
- Todaro, M. P. (2008). Pembangunan Ekonomi (Jilid 1) (Edisi 9). In *Edisi Kesembilan terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji AL Jakarta: Erlangga*.



Pengaruh Pemanfaatan *Smartphone* Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Srijaya Negara Palembang

Leman Arahab¹, Erma Yulaini², Nova Pratiwi^{3*}

lemanarahab763@gmail.com¹, ermayulaini074@gmail.com², vhpratiwi@gmail.com^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Akuntansi

^{1,2,3}Universitas PGRI Palembang

Received: 25 02 2022. Revised: 02 03 2022. Accepted: 07 03 2022.

Abstract : The problem in this study is whether there is an effect of smartphone use on student learning outcomes at SMA Srijaya Negara Palembang. The purpose of this study was to determine whether there was an influence of smartphones on economic learning outcomes during the COVID-19 pandemic at Srijaya Negara Palembang High School. The research method used is descriptive quantitative method. And for data analysis used is questionnaire data analysis, questionnaire data analysis, normality test, linearity test, simple regression test, calculation of the coefficient of determination and t test with a population of class XI IPS, sampling is done by sampling saturated is a sampling technique if all population members are used as samples. The sample is part of the population that has relatively the same characteristics and is considered to be representative of the population so that as many as 60 students are obtained. Data collection techniques used are questionnaires and documentation. Based on the discussion of the research results, the use of smartphones is categorized as having a good positive impact on students of SMA Srijaya Negara Palembang in the 2021/2022 academic year of 77.12 in the Strong category. Enough". The normality test of the data on the independent variable (x) of smartphone utilization is $X^2_{count} 20.6 < X^2_{table} 90.5$. And for the dependent variable (y) learning outcomes are $X^2_{count} 33.8 < X^2_{table} 90.5$. the regression equation is $= 0.016 + 0.018x$ "t" test with a significance level $= 005/2 = 0.0025$ then look for ttable on the t distribution with the provisions $db = n-2 = 60-2 = 58$ so that $t_{adb} = t(0, 05, 58) = 2,000$ the purpose of comparing ttable with tcount is to find out whether H_0 is rejected or accepted based on the above test rules, then $t_{count} > t_{table}$ is $3.1742 > 2,000$ then H_a is accepted. This means that there is an effect of using a smartphone on the results of case study economics during the COVID-19 pandemic at Srijaya Negara Palembang High School.

Keywords : Smartphone utilization, Learning outcomes

Abstrak : Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh pemanfaatan *smartphone* terhadap hasil belajar siswa di SMA Srijaya Negara Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh *smartphone* terhadap hasil belajar ekonomi pada masa pandemi covid-19 di SMA Srijaya Negara Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Untuk analisis data yang digunakan adalah

analisis data angket, analisis data angket, uji normalitas, uji linieritas, uji regresi sederhana, perhitungan koefisien determinasi dan uji t dengan populasi kelas XI IPS, pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pemanfaatan *smartphone* dikategorikan memberikan dampak positif yang baik bagi siswa SMA Srijaya Negara Palembang tahun pelajaran 2021/2022 sebesar 77,12 dalam kategori Kuat. Berdasarkan rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yaitu 65,166 berada pada kategori "Cukup". uji normalitas data pada variabel bebas (x) pemanfaatan *smartphone* adalah sebesar $X^2_{hitung} 20,6 < X^2_{tabel} 90,5$. Dan untuk variabel terikat (y) hasil belajar adalah sebesar $X^2_{hitung} 43,04 < X^2_{tabel} 90,5$. persamaan regresi yaitu $\hat{Y} = 44,17 + 0,28x$ uji "t" dengan taraf signifikansi = $0,05/2 = 0,0025$ kemudian dicari ttabel pada distribusi t dengan ketentuan $df = n - 2 = 60 - 2 = 58$ sehingga $t_{db} = t(0,05,58) = 2,00172$ tujuan membandingkan ttabel dengan thitung adalah untuk mengetahui apakah H_0 ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian diatas maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,5702 < 2,00172$ maka H_0 diterima. Berarti ada pengaruh pemanfaatan *smartphone* terhadap hasil belajar ekonomi studi kasus pada masa pandemi covid 19 di SMA Srijaya Negara Palembang.

Kata Kunci : Pemanfaatan *smartphone*, Hasil belajar

PENDAHULUAN

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh ini melaksanakan interaksi dengan berbantuan internet yang didukung perangkat *mobile* seperti *smartphone*/telpon android, laptop, komputer, tablet dan iphone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dimanapun dan kapan pun. *Smartphone* dapat menjadi sarana belajar untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih canggih dan mudah di bawah kemana-mana dan juga buku-buku sekarang banyak yang elektronik. Dengan fitur yang aneka ragam, *smartphone* juga sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. *smartphone* untuk mengaksesnya, yang kita ketahui *smartphone* merupakan alat teknologi informasi yang memiliki bentuk kecil dan memiliki fungsi khusus, jadi dengan memanfaatkan *smartphone*, masyarakat dapat mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja karena bentuknya yang kecil dan bisa dibawa kemana saja.

Berdasarkan observasi sebelum peneliti yang dilakukan oleh peneliti di SMA Srijaya Negara Palembang pada dasarnya siswa tidak diperkenankan membawa *smartphone* ke sekolah.

Samahalnya dengan sekolah-sekolah lainnya, SMA Srijaya Negara Palembang menerapkan kebijakan pembelajarandaring sesuai arahan Kemendikbud supaya siswa tidak ketinggalan pelajaran dalam kondisi saat ini guru melakukan pembelajaran daring malalui aplikasi *classroom* untuk memberikian materi,tugas, mengumpulkan tugas dan memberikan nilai, dan *zoom meeting* untuk melakukan tatap muka atau absensi kelas (Kemendikbud, 2020).

Anak yang berhasil dalam belajaradalah yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan terjadinya perubahan dalam melaksanakan belajar mengajar karena terjadi pandemi *covid-19*, di Indonesia sendiri terjadinya pada 02 maret 2019 dan mengubah mobilitas manusia termasuk rutinitas yangdilakukan keluarga dan dikeluarkan kebijakan dari Kemendikbud bahwaanak-anak harus belajar dirumah akibatpenerapan *physical distancing*, anak-anak tidak dianjurkan untuk bermain dengan teman-temannya diluar rumah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran *covid-19* pada masa pandemi ini telah berubah proses belajar mengajar dari seharusnya siswa harus datang kesekolah hari senin-sabtu dan sekarang telah berubah semua karena terjadinya pandemi ini, dan dimasa pandemi ini siswa tidak boleh datang ke sekolah dan belajar di rumah agar proses belajar mengajar bisa terlaksanakan maka diterapkanlah kebijakan pembelajaran secara daring untuk setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh pemanfaatan *smartphone* terhadap hasil belajar ekonomi pada masapandemi *covid-19* di SMA Srijaya Negara Palembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagaicara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu(Sugiyono, 2017). Metode penelitian dalam proses ini untuk mengkaji dan mendeskripsikan Pengaruh pemanfaatan *Smartphone* terhadap hasil Belajar Ekonomi Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Srijaya Negara Palembang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena data yang disajikan berupa angka-angka (Sugiyono, 2017). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian deksriptif kuantitatif. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelas XI SMA Srijaya Negara Palembang jumlah siswa kelas XI IPS 130 siswa dan XI IPS 2 30 siswa jumlah keseluruhannya adalah 60 siswa. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *sampling jenuh* merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. sampel ini diambil dengan menggunakan *sampling jenuh* yaitu setiap kelas akan diambil semua sebagai sampel di

karenakan populasi yang diambil kurang dari 100 orang makadari itu peneliti mengambil semua populasi.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Reliabilitas. Teknik Pengumpulan Data menurut (Sugiyono, 2015) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena bertujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Angket dan Dokumentasi. Teknik analisis a data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data Angket, Teknik analisis data Hasil Belajar, Uji Normalitas data, Uji Linieritas, Uji Regresi Sederhana, Perhitungan Koefisien Determinasi dan Uji-t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penyebaran angket yang diberi kepada siswa untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan *smartphone* terhadap hasil belajar ekonomi di SMA Srijaya Negara Palembang. Instrumen padaangket ini dibuat dengan 2 indikator yaitu: 1) dampak positif pemanfaatan *Smartphone*, 2) dampak negatif pemanfaatan *Smartphone*. Angket yang digunakan dalam penelitian ini dibuat secara tertutup dan disebarakan melalui link *google formulir* secara *online* dengan menggunakan *whatsaap*. Angket terdiri dari 25 pernyataan dengan jawaban selalu bernilai 4, Sering bernilai 3, Kadang-kadang bernilai 2, dan Tidak Pernah bernilai 1. Berikut ini hasil angketyang sudah disebarakan kepada siswa kelas XI IPS 1 & XI IPS 2 Tahun Pelajaran 2021/2022. Berdasarkan hasil pengujian angket kepada siswa kelas XI IPS I & XI IPS 2 dinyatakan dari 30 butir pertanyaan terdapat 25 butir pertanyaan yang valid dan 5 butir pertanyaan yang tidak valid, sehingga angket yang dapat disebarakan atau digunakan sebanyak 25 butir pertanyaan.

Tabel 1. Hasil Pernyataan Responden pada Indikator Dampak Positif

No	Item	Frekuensi Responden				Total	Frekuensi Skor				Total	Frekuensi %				Total	Ket
		SS	SR	K	TP		SS	SR	K	TP		SS	SR	K	TP		
Dampak Positif Pemanfaatan <i>smartphone</i>																	
A. Dapat menambah wawasan dengan akses internet serta keaktifan dalam mengakses pembelajaran																	
1	Saya memanfaatkan <i>smartphone</i> untuk menemukan pengetahuan baru tentang pembelajaran ekonomi	15	18	27	0	60	60	54	54	0	168	25	23	23	0	70	Kuat
2	Saya memanfaatkan <i>smartphone</i> untuk menemukan referensi pembelajaran	2	56	2	0	60	8	168	4	0	240	3,3	70	1,7	0	75	Kuat
3	Saya memanfaatkan <i>smartphone</i> untuk kegiatan sehari-hari	34	22	4	0	60	136	66	8	0	270	57	28	3,3	0	87,5	Sangat Kuat
4	Saya lebih banyak mencari materi belajar tentang ekonomi	34	21	4	1	60	136	63	8	1	268	57	26	3,3	0,4	86,67	Sangat Kuat
5	Saya sering mencari bahan belajar di internet melalui <i>smartphone</i> dari pada ke perpustakaan	33	23	4	0	60	132	69	8	0	269	55	29	3,3	0	87,08	Sangat Kuat
6	Saya memanfaatkan <i>smartphone</i> untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru	33	23	3	1	60	132	69	6	1	268	55	29	2,5	0,4	86,67	Sangat Kuat
B. Dapat menambah wawasan dengan akses internet serta keaktifan dalam mengakses pembelajaran																	
7	Saya menggunakan Chrome untuk mengakses informasi tentang pembelajaran ekonomi	34	23	2	1	60	136	69	4	1	210	57	29	1,7	0,4	87,5	Sangat Kuat
8	Saya menggunakan Google untuk mencari bahan informasi pembelajaran	32	22	6	0	60	128	66	12	0	206	53	28	5	0	85,83	Sangat Kuat
9	Saya menggunakan YouTube untuk mencari informasi pembelajaran	31	18	9	1	59	124	54	18	1	197	52	23	7,5	0,4	82,08	Sangat Kuat
10	Saya menggunakan YouTube tetapi saya lebih banyak melihat konten-konten yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran	34	18	6	2	60	136	54	12	2	204	57	23	5	0,8	85	Sangat Kuat
11	Saya memanfaatkan Zoom untuk melakukan pembelajaran daring	34	19	7	0	60	136	57	14	0	207	57	24	5,8	0	86,25	Sangat Kuat
12	Saya menggunakan Zoom bisa diandalkan ketika pembelajaran daring mulai	38	14	7	1	60	152	42	14	1	209	63	18	5,8	0,4	87,08	Sangat Kuat
13	Saya menggunakan Google Classroom di pakai pada pandemi ini ketika pembelajaran	38	10	11	1	60	152	30	22	1	205	63	13	9,2	0,4	85,42	Sangat Kuat
14	Saya memanfaatkan Google Classroom tempat untuk mengumpulkan tugas	41	9	9	1	60	164	27	18	1	210	68	11	7,5	0,4	87,5	Sangat Kuat
15	Google Classroom mengalami kendala dalam mengakses tugas atau materi yang diberikan guru	38	5	14	3	60	152	15	28	3	198	63	6,3	12	1,3	82,5	Sangat Kuat
16	Guru memanfaatkan Whatsapp untuk informasi tentang pembelajaran	35	6	16	3	60	140	18	32	3	193	58	7,5	13	1,3	80,42	Sangat Kuat
17	Whatsapp sangat berguna saat pembelajaran daring pada saat ini	31	4	22	3	60	124	12	44	3	183	52	5	18	1,3	76,25	Kuat
18	Pemanfaatan Whatsapp lebih banyak chatting dengan teman dari pada berdiskusi tentang pembelajaran	22	2	30	6	60	88	6	60	6	160	37	2,5	25	2,5	66,67	Kuat
19	Whatsapp bisa diandalkan untuk informasi pembelajaran	15	2	37	6	60	60	6	74	6	146	25	2,5	31	2,5	60,83	Kuat
C. Keefektifan Smartphone Dalam Belajar.																	
20	Selain <i>smartphone</i> alat yang lain di gunakan seperti komputer, leaptop, tablet untuk pembelajaran daring ini	9	1	40	10	60	36	3	80	10	129	15	1,3	33	4,2	53,75	Sedang
21	Saya mengikuti setiap perkembangan pembelajaran terbaru dimedia sosial	2	2	45	11	60	8	6	90	11	115	3,3	2,5	38	4,6	47,92	Sedang
22	Penggunaan <i>smartphone</i> sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari	3	2	44	11	60	12	6	88	11	117	5	2,5	37	4,6	48,75	Sedang
RATA-RATA DAMPAK POSITIF ITEM PEMANFAATAN SMARTPHONE															77,12	Kuat	

Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata pada indikator dampak positif dengan 14 pernyataan sebesar 77,12 dalam kategori Kuat.

Tabel 2. Hasil Pernyataan Responden pada Indikator Dampak Negatif

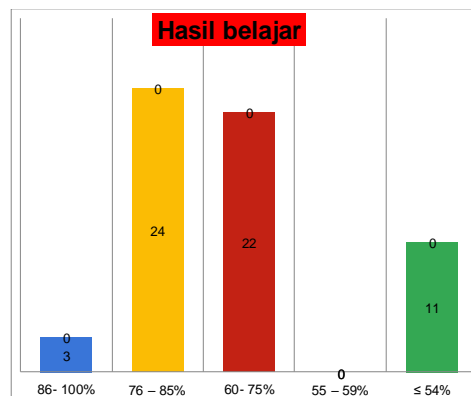
No	Item	Frekuensi Responden				Total	Frekuensi Skor				Total	Frekuensi %				Total	Ket
		SS	SR	K	TP		SS	SR	K	TP		SS	SR	K	TP		
D. Bermain game, Buka sosial media dan Sebagai sarana komunikasi dan lainnya																	
23	Setiap malam sebelum tidur saya menggunakan <i>Smartphone</i> untuk membuka sosial media hingga larut malam	7	25	20	8	60	7	50	60	32	149	2,9	21	25	13	62,08	Kuat
24	Hasil belajar saya turun karena saya lebih banyak membuka sosial media dengan <i>Smartphone</i>	5	25	20	10	60	5	50	60	40	155	2,1	21	25	17	64,58	Kuat
25	Waktu saya lebih banyak memainkan <i>smartphone</i> dari pada belajar	2	24	20	14	60	2	48	60	56	166	0,8	20	25	23	69,17	Kuat
RATA-RATA DAMPAK NEGATIF ITEM PEMANFAATAN SMARTPHONE															62,8	Kuat	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata pada indikator dampak negatif dengan 7 pernyataan sebesar 62,8 pada kategori Kuat. Data Hasil belajar siswa didapat dari nilai ulangan harian siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 pada semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 pada mata pelajaran ekonomi. Adapun data hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2

No	Nama	Nilai	Keterangan	No	Nama	Nilai	keterangan
1	Aang saputra	90	Sangat Baik	31	M. Ridwan Raudhian	70	Cukup
2	Ananda marchsella	80	Baik	32	M.raffe mehadi	80	Baik
3	Aulia nabila	40	Kurang Sekali	33	Maurin sabrina putri bessy	90	Sangat Baik
4	Bayu Fajri	80	Baik	34	Melisa	40	Kurang Sekali
5	Chanda Dwipa Agustina	60	Cukup	35	MOHD ROBBI FEBRIANSYAH	80	Baik
6	Daffa farido	50	Kurang	36	Muhamad Amrianza Bakti Persada	80	Baik
7	Dea agustin	70	Cukup	37	Muhammad Imam Maulana	80	Baik
8	Dea agustin	70	Cukup	38	Muhamad raihan	80	Baik
9	Delia feby nazela	80	Baik	39	Nabila azzahra	50	Kurang Sekali
10	Delia feby nazela	80	Baik	40	Nabila Rahmadani	80	Baik
11	Devia Tri Wahyuni	50	Kurang Sekali	41	Nadia tri handayani	80	Baik
12	Dia indah lestari	60	Cukup	42	nasywa shakhira afriady	70	Cukup
13	dyakyyah aulia nadzifah sitorus	60	Cukup	43	Nata chantika aisyah	50	Kurang Sekali
14	Fardeansyah	80	Baik	44	Nayla Maharani Siregar	80	Baik
15	Ferdi ahmadillah	80	Baik	45	Nur rahmadania	70	Cukup
16	Firsa Adelia	70	cukup	46	Nurbaiti	80	Baik
17	Gabriel ananta	40	Kurang Sekali	47	NYIMAS MARDIAH DYJKA	80	Baik
18	Hafiza Nurjannah	70	Cukup	48	Rahmat sabili	80	Baik
19	Iham firdaus	50	Kurang Sekali	49	Repaklo duwi putra	70	Cukup
20	Ihan	80	Baik	50	Rianto	80	Baik
21	Julia Fransiska	80	Baik	51	Sheila Ardella	70	Cukup
22	M aditya ramadhan	60	Cukup	52	sinta rahman agusman	90	Sangat Baik
23	M aditya ramadhan	80	Baik	53	Tio widiansyah	70	Cukup
24	M Aditya Ramsdhan	80	Baik	54	Toni kurniaswan	80	Baik
25	M Daifarel Putra Yusri	40	Kurang Sekali	55	Tri hartati	70	Cukup
26	M Indra saputra	80	Baik	56	Vahral Trie Putra	80	Baik
27	M IRFAN AZIZ	60	Cukup	57	WILDAN AHAD	80	Baik
28	M ROBIL ALLAMIN HABILLILLAH	50	Kurang Sekali	58	Yolanda Saksabila	80	Baik
29	M ziamir	70	Cukup	59	Yunita dwi cahyani	70	Cukup
30	M. Allir juniansyah	60	Cukup	60	YURIANSYAH ALVIN TRIANDO	50	Kurang Sekali
Jumlah						4210	
Rata-Rat						70.1667	Cukup

No	Tingkat Penguasaan	Jumlah Siswa	Predikat
1	86- 100%	3	Sangat Baik
2	76 – 85%	24	Baik
3	60- 75%	22	Cukup
4	55 – 59%	0	Kurang
5	≤ 54%	11	Kurang Sekali



Gambar 1. Diagram Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan diagram diatas maka dilihat hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 tahun pelajaran 2021/2022 dalam kategori Sangat Baik ada 3 siswa dengan interval nilai 86-100 dan dalam kategori Baik ada 24 siswa dengan interval nilai 76-85, dalam kategori cukup 22 siswa dengan interval 60-75, dalam kategori kurang ada 0 siswa dengan interval 55-59 dan ada 11 siswa dalam kategori kurang sekali dengan interval ≤54.

Pada masa pandemi *covid 19* yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia pada saat ini pemerintah membuat kebijakan sekolah diliburkan dan tidak bisa belajar secara langsung, dalam proses belajar mengajar diterapkan secara online (daring) agar siswa tidak ketinggalan materi pembelajaran semua siswa belajar dirumah dengan menggunakan *smartphone* melalui aplikasi *whatsapp* dan *google classrom*. Dari data penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 28 Agustus 2021 di SMA Srijaya Negara Palembang semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemanfaatan *smartphone* terhadap hasil belajar ekonomi studi kasus pada masa

pandemi *covid 19* di SMA Srijaya NegaraPalembang. Peneliti menggunakan 2 kelas sebagai sampel terdiri dari XI IPS 1 yang berjumlah 30 siswa dan kelas XI IPS 2 yang berjumlah 30 siswa. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket dengan cara menyebarkan kuesioner online menggunakan *google formulir* dan dokumentasi untuk memperoleh hasil nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran ekonomi.

Dari penyebaran angket melalui *online* kepada siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 menunjukkan data sebagai berikut: Hasil penelitian pada indikator dampak positif dalam pembelajaran online secara daring menggunakan *smartphone* menunjukkan hasil penelitian pada indikator dampak positif penggunaan *smartphone* sebagai berikut:

Hasil penelitian pada indikator dampak positif pada siswa memanfaatkan *smartphone* untuk menemukan pengetahuan baru tentang pembelajaran ekonomi pada pernyataan siswa menunjukkan sebesar 70 dalam kategori kuat, kemudian siswa memanfaatkan *smartphone* untuk menemukan referensi pembelajaran pada pernyataan siswa menunjukkan sebesar 75 dalam kategori kuat, lalu siswa memanfaatkan *smartphone* untuk kegiatan sehari-hari menunjukkan pernyataan siswa sebesar 87,5 dalam kategori sangat kuat, lalu pada item siswa lebih banyak mencari materi belajar tentang ekonomi menunjukkan pernyataan siswa sebesar 86,5 dalam kategori sangat kuat, pada item siswa sering mencari bahan belajar di internet melalui *smartphone* dari pada ke perpustakaan menunjukkan pernyataan 87,1 dalam kategori sangat kuat, dalam item siswa memanfaatkan *smartphone* untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru menunjukkan pernyataan 86,7 dalam kategori sangat kuat, pada item siswa menggunakan *Chrome* untuk mengakses informasi tentang pembelajaran ekonomi menunjukkan pernyataan sebesar 87,5 dalam kategori sangat kuat, pada item siswa menggunakan Google untuk mencari bahan informasi pembelajaran menunjukkan pernyataan sebesar 85,8 dalam kategori sangat kuat, dalam item siswa menggunakan *YouTube* untuk mencari informasi pembelajaran menunjukkan pernyataan sebesar 82,1 dalam kategori sangat kuat, pada item siswa menggunakan *YouTube* tetapi saya lebih banyak melihat konten-konten yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran menunjukkan pernyataan sebesar 85 dalam kategori sangat kuat, pada item siswa memanfaatkan *Zoom* untuk melakukan pembelajaran daring menunjukkan pernyataan sebesar 86,3 dalam kategori sangat kuat, pada item siswa menggunakan *Zoom* bisa diandalkan ketika pembelajaran daring mulai menunjukkan pernyataan sebesar 87,1 dalam kategori sangat kuat, dalam item siswa menggunakan *Google Classroom* di pakai pada pandemi ini ketika pembelajaran menunjukkan pernyataan sebesar siswa memanfaatkan *Google Classroom* tempat untuk mengumpulkan tugas menunjukkan pernyataan sebesar 87,5 dalam

kategori sangat kuat, pada item siswa memanfaatkan *Google Classroom* mengalami kendala dalam mengakses tugas atau materi yang diberikan guru menunjukkan pernyataan sebesar 82,5 dalam kategori sangat kuat, dalam item Guru memanfaatkan *Whatsapp* untuk informasi tentang pembelajaran menunjukkan pernyataan sebesar 80,4 dalam kategori sangat kuat, pada item *Whatsapp* sangat berguna saat pembelajaran daring pada saat ini menunjukkan pernyataan sebesar 76,3 dalam kategori kuat, pada item Pemanfaatan *Whatsapp* lebih banyak chattingan dengan teman dari pada berdiskusi tentang pembelajaran menunjukkan pernyataan sebesar 66,7 dalam kategori kuat, pada item *Whatsapp* bisa diandalkan untuk informasi pembelajaran menunjukkan pernyataan sebesar 60,8 dalam kategori kuat, pada item Selain *smartphone* alat yang lain di gunakan seperti komputer, laptop, tablet untuk pembelajaran daring ini menunjukkan pernyataan sebesar 53,8 dalam kategori sedang, pada item siswa mengikuti setiap perkembangan pembelajaran terbaru di media sosial menunjukkan pernyataan sebesar 47,9 dalam kategori sedang, pada item Penggunaan *smartphone* sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan pernyataan sebesar 48,8 dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan menurut indikator dampak positif pada tiap item-item menunjukkan rata-rata pernyataan siswa sebesar 77,1 dalam kategori Kuat. Hasil penelitian pada kategori indikator dampak negatif penggunaan *smartphone* yaitu: Hasil penelitian pada indikator dampak negatif, pada item setiap malam sebelum tidur saya menggunakan *Smartphone* untuk membuka sosial media hingga larut malam menunjukkan pernyataan sebesar 62,1 dalam kategori kuat, pada item Hasil belajar saya turun karena saya lebih banyak membuka sosial media dengan *Smartphone* menunjukkan pernyataan sebesar 64,6 dalam kategori kuat, pada item waktu saya lebih banyak memainkan *smartphone* dari pada belajar menunjukkan pernyataan sebesar 69,2 dalam kategori kuat. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan menurut indikator dampak negatif pada tiap item-item menunjukkan rata-rata pernyataan siswa sebesar 65,3 dalam kategori kuat. Hasil dari rata-rata indikator dampak positif sebesar 77,1 dalam kategori S Kuat sedangkan rata-rata pada indikator dampak negatif sebesar 65,3 dalam kategori Kuat, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan *smartphone* termasuk kategori berdampak positif dalam penggunaannya.

Dari hasil dokumentasi yaitu berupa nilai ulangan harian mata pelajaran ekonomi nilai siswa yang paling rendah 30 dan nilai yang paling tertinggi 80. dalam kategori Sangat Baik ada 0 siswa dengan interval nilai 86-100 dan dalam kategori Baik ada 26 siswa dengan interval nilai 76-85, dalam kategori cukup 17 siswa dengan interval 60-75, dalam kategori kurang ada 0 siswa dengan interval 55-59 dan ada 17 siswa dalam kategori kurang sekali dengan interval ≤ 54 . Ini

menunjukkan bahwa siswa mampu mengikuti pelajaran ekonomi dengan nilai rata-rata 65,166 dalam kategori cukup, sehingga siswa dapat mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu 65.

Hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi kuadrat data pada variabel bebas (x) pemanfaatan *smartphone* adalah sebesar $X^2_{hitung} 20,6 < X^2_{tabel} 90,5$. Dan untuk variabel terikat (y) hasil belajar adalah sebesar $X^2_{hitung} 43,04 < X^2_{tabel} 90,5$. Dengan demikian dari kedua variabel tersebut X^2_{hitung} lebih kecil dari X^2_{tabel} dikatakan data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil persamaan regresi yaitu $\hat{Y} = 44,17 + 0,28 X$ dan diperoleh dari hasil koefisien determinasi dan ada 2 langkah mencari koefisien determinasi yang pertama membuat tabel dan menghitung nilai korelasi diperoleh hasil dengan menggunakan uji “t” dengan taraf signifikansi = $005/2=0,0025$ kemudian dicari t_{tabel} pada distribusi t dengan ketentuan $db= n-2= 60-2 =58$ sehingga $t_{adb}= t_{(0,05,58)}= 2,00172$ tujuan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} adalah untuk mengetahui apakah H_0 ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian diatas maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,5702 < 2,00172$ maka H_0 diterima. Berarti ada pengaruh pemanfaatan *smartphone* terhadap hasil belajar ekonomi studi kasus pada masa pandemi covid 19 di SMA Srijaya Negara Palembang.

Hasil penelitian sependapat dengan penelitian yang dilakukan (Suryani, 2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan *smartphone* berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Dengan menggunakan *smartphone* yang diisi dengan aplikasi seperti *chat*, email dan media sosial, hal itu dapat mempermudah bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga untuk membagikan informasi melalui media media sosial yang bisa viral dan secara cepat tersebar luas. Contohnya saja saat terjadi bencana alam disuatu tempat informasi lebih bisa dilihat melalui peran media sosial.

Hal ini sejalan dengan (Septyawan, 2019) yang berjudul Pengaruh Penggunaan *Smartphone* Terhadap Perilaku Komunikasi Siswa dari penelitian terhadap penggunaan *smartphone* terhadap perilaku siswa yaitu pada orang tua harus teliti mengenai adanya informasi-informasi atau tontonan yang tersebar di *smartphone* dapat mengandung hal-hal yang bermanfaat. Bagi orang tua harus sering berkomunikasi dengan anak dan memberikan pemahaman dari segi positif dan negatif, ketika *smartphone* bersifat negatif anak bisa kritis dan peka dengan apa yang telah disaksikan karena tanpa pendampingan orang tua maka anak tidak bisa memfilter atau menyaring apa yang telah disaksikan.

Hal ini sejalan dengan (Gardenia, 2018) yang berjudul pengaruh penggunaan *smartphone* terhadap prestasi belajar mahasiswa melalui motivasi belajar dari penelitian selama

pembelajaran daring yaitu mahasiswa cenderung selalu menggunakan *smartphone* mereka dibandingkan membaca buku. Hal ini didukung dengan penelitian kuesioner yang dilakukan peneliti bahwa mahasiswa menggunakan *smartphone* untuk mendukung kegiatan belajar dengan salah satunya mahasiswa menggunakan *browser* untuk mencari sumber pelajaran selain buku banyak orang yang menganggap bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh dari membaca buku tetapi juga lewat internet yang mudah diakses menggunakan *smartphone*, orang-orang lebih memilih untuk memanfaatkan *smartphone* untuk kemudahan mencari informasi berita dan pengetahuan yang baru maupun lama dengan menggunakan *smartphone* ketimbang pergi mencari buku-buku di perpustakaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Asifa, 2021) dengan judul Pengaruh Penggunaan Smartphone, Lingkungan Teman Sebaya, Minat Belajar, dan Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata, dari penelitian ini yang menyatakan adanya pengaruh dari penggunaan *smartphone* terhadap hasil belajar melalui minat belajar siswa, Seharusnya siswa harus mengontrol dalam penggunaan *smartphone* saat berada disekolah. pembelajaran berlangsung dan sebaiknya menggunakan *smartphone* yang dimiliki untuk membuka aplikasi yang mendukung pembelajaran.

Hasil penelitian sedapat dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa pemanfaatan *smartphone* berpengaruh terhadap hasil belajar ekonomi. Pemanfaatan *smartphone* sebagai sumber belajar ialah salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan Dalam melakukan proses belajar terutama pada pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19. Pemanfaatan *smartphone* sebagai sumber belajar siswa di sekolah proses pembelajaran tidak bisa terlepas dari keberadaan penggunaan sumber belajar. *smartphone* merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai alat peraga atau sebagai alat pemberi informasi kepada anak atau orang dewasa (Budiono, 2015)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan *smartphone* dalam indikator Positif dengan nilai rata-rata sebesar 77,12 dengan kategori “Kuat” sedangkan dalam indikator Negatif dengan nilai rata-rata sebesar 65,28 dengan kategori “Kuat”. Pemanfaatan *smartphone* dikategorikan memberikan dampak positif yang baik bagi siswa SMA Srijaya Negara Palembang tahun pelajaran 2021/2022 dengan nilai rata-rata dampak positif dan negatif sebesar 76,9 dalam kategori Kuat. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yaitu 70,1667 berada pada kategori “Cukup”. Ada

“Pengaruh pemanfaatan smartphone terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Srijaya Negara Palembang tahun pelajaran 2021/2022 dengan besar pengaruh yaitu sebesar 14,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Asifa, A. L. (2021). Pengaruh Penggunaan Smartphone, Lingkungan Teman Sebaya, Minat Belajar, dan Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata In *SKRIPSI Mahasiswa UM*.
- Budiono, F. L. (2015). Persepsi dan Harapan Pengguna terhadap Kualitas Layanan Data pada Smartphone di Jakarta. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 11(2). <https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110201>
- Gardenia, A. (2018). *Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Melalui Motivasi Belajar* [Universitas Sana Dharma]. https://repository.usd.ac.id/17687/2/131334072_full.pdf
- Kemendikbud. (2020). *Surat Edaran Kemdikbud Nomor 4 Tahun 2020*.
- Septyawan, C. (2019). *PENGARUH PENGGUNAAN SMARTPHONE TERHADAP PERILAKU KOMUNIKASI SISWA KELAS IX SMPN 3 SUNGGUMINASA* [UIN Alauddin]. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14691/1/CHATUR SEPTYAWAN.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14691/1/CHATUR%20SEPTYAWAN.pdf)
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, A. I. (2020). MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DI KELAS VII-1 MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN CARA BELAJAR SISWA AKTIF DI SMP NEGERI 2 PANCUR BATU TAHUN PELAJARAN 2019/2020. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA*, 5(1). <https://doi.org/10.32696/jp2bs.v5i1.395>



Pengaruh K3 pada Perilaku Pekerja Konstruksi Di Pembangunan Gedung UM Buton

La Sianto^{1*}, Muhammad Chaidir Hajia²

siantho.civil07@gmail.com^{1*}, muhammadchaidir@gmail.com²

^{1,2}Program Studi Teknik Sipil

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton

Received: 02 02 2022. Revised: 18 02 2022. Accepted: 07 03 2022.

Abstract : The work on occupational health and safety management in the Buton UM building construction project and the lecture building is still lacking; Workplace safety and security services remain woefully inadequate and staff still lack health and safety care. The location of the study in this research is the construction of the New UM Buton Building, Baubau City, Southeast Sulawesi Province. In research on the Effect of Occupational Health and Safety on Worker Behavior, it will be held on September 21, 2021 – October 10, 2021. Data collection using the questionnaire method is usually done by distributing questionnaires to a number of predetermined respondents. From the results of the study, it is known that there are several main variables that affect the behavior of workers in the construction project of the UM Buton Building, occupational health and safety management with a mean value of 797.11, occupational health and safety regulations and procedures with a mean value of 217.25, communication with a mean value of 216.75, worker competence with a mean value of 229.75, worker involvement with a mean value of 224,667, work environment with a mean value of 223.10 and worker behavior with a mean value of 175.00.

Keywords : K3, Safety Work, UM Buton,

Abstrak : Pekerjaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek pembangunan gedung UM Buton dan gedung perkuliahan masih kurang; Layanan keselamatan dan keselamatan tempat kerja tetap sangat tidak memadai dan staf masih kurang perawatan kesehatan dan keselamatan. Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah Pembangunan Gedung Baru UM Buton Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian mengenai Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Perilaku Pekerja dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 – 10 Oktober 2021. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner biasa dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap sejumlah responden telah ditentukan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa variabel utama yang mempengaruhi perilaku pekerja pada proyek pembangunan Gedung UM Buton manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan nilai mean 797,11, peraturan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dengan nilai mean 217,25, komunikasi dengan nilai mean 216,75, kompetensi pekerja dengan nilai mean 229,75, keterlibatan pekerja dengan nilai mean 224,667, lingkungan kerja dengan nilai mean 223,10 dan perilaku pekerja dengan nilai mean 175,00.

Kata Kunci: K3, Keselamatan Kerja, UM Buton.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang terlibat di segala bidang, salah satunya adalah membangun. Setiap proyek dirancang berbeda, pekerjaan yang dirancang dengan kuat oleh faktor cuaca dan lingkungan merupakan salah satu hubungan yang dapat membuat suatu proyek bangunan berbeda dari proyek industri lainnya (Chomiarti, 2011). Atribut ini berkontribusi pada kondisi tidak aman untuk proyek bangunan dan kecelakaan kerja. Setiap tahun di Indonesia, pekerjaan konstruksi termasuk kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cacat sebagian atau permanen, yang sebagian besar bersifat sementara. Keamanan dan kesehatan di tempat kerja menandakan bagaimana seseorang menjaga dirinya sendiri karena beban kerja yang dibutuhkan oleh karyawan untuk hasil pekerjaan yang utuh. Sistem manajemen keselamatan kerja adalah pengendalian K3 melalui penerapan sistem manajemen untuk menghindari cedera dan dampak buruk lainnya secara efektif (Christina et al., 2012).

Pekerjaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek pembangunan gedung auditorium FKIP UM Buton dan gedung perkuliahan masih kurang. (Husni, 2000) Layanan keselamatan dan keselamatan tempat kerja tetap sangat tidak memadai dan staf masih kurang perawatan kesehatan dan keselamatan. Manajemen keselamatan dan kesehatan akibat cedera dan kesehatan kerja yang disebabkan oleh kurangnya manajemen kesehatan dan keselamatan tidak hanya merugikan staf, tetapi juga merusak dan negara, secara langsung dan tidak langsung. Insiden pekerjaan juga berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (HDI) serta IPK. (Geller, 2017) Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan bahwa Indonesia terus menghadapi sejumlah besar cedera di tempat kerja dan berbagai risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Dalam proses pembuatannya, berbagai kecelakaan kerja terus terjadi, khususnya di sektor konstruksi.

Keselamatan di tempat kerja adalah fasilitas, tempat kerja, iklim, dan praktik kerja. Perlindungan kerja adalah tanggung jawab setiap pekerja (Bannnet dan Rumondang, 1995). Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Manajemen Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 menetapkan jika penerapan kerangka kerja pengelolaan K3 lebih diinginkan daripada promosi keselamatan kerja dan keselamatan K3 yang produktif, maka peningkatan dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (S) (Reason, 2016).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang dibahas adalah Pengaruh K3 Pada Perilaku Pekerja Konstruksi Pembangunan Gedung UM Buton. Peneliti mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran secara langsung dari lokasi yang sedang diteliti, berupa perilaku pekerja saat sedang bekerja. Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pekerja guna mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pekerja saat bekerja di proyek tersebut, khususnya masalah kesehatan dan keselamatan kerja lokasi kajian dalam penelitian ini adalah Pembangunan Gedung Baru UM Buton Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam penelitian mengenai Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Perilaku Pekerja dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 – 10 Oktober 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek atau subjek penelitian (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner biasa dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner terhadap sejumlah responden atau pekerja yang telah ditentukan sebelumnya mengenai pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap perilaku pekerja dalam proyek pembangunan gedung baru UM Buton. Dengan tujuan untuk memperoleh jawaban- jawaban yang akan digunakan sebagai data dalam penelitian dan diharapkan dapat menjawab tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Selanjutnya pengumpulan data melalui survei atau observasi merupakan cara pengamatan secara langsung dilokasi proyek pembangunan gedung baru UM Buton. Data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian (Moleong, 2010).

Tahapan analisis data dilakukan dengan cara mengolah data yang telah ada dan menggunakan aplikasi SPSS 2013. Analisis yang digunakan terdiri dari beberapa tahap yaitu pembuatan dan penyusunan kuisisioner bagian pertama dimulai dengan pengisian data umum responden atau karakteristik responden. Pada bagian kedua kuisisioner ini, responden akan diminta untuk memberikan penilaian tentang keselamatan dan kesehatan kerja dilokasi proyek konstruksi. Pada bagian ketiga kuisisioner, responden diminta untuk memberikan penilaian tentang faktor-faktor yang paling mempengaruhi pembentukan budaya perilaku kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di proyek konstruksi. Pertanyaan yang di ajukan merupakan pertanyaan tertutup, jawaban responden menggunakan skala *likert*, dengan skala 1 sampai dengan 5 paling sesuai. Pada bagian ini, pertanyaan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah melakukan pengumpulan data sekunder, diketahui populasinya.

Populasi adalah sekumpulan unit yang biasanya berupa orang atau benda (Sugiyono,

2017). Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pekerja proyek. Populasi pada proyek pembangunan gedung auditorium dan gedung perkuliahan FKIP UM Buton berjumlah 47 orang. Dengan demikian didapatkan jumlah sampel sebanyak 47 sampel. Setelah pembuatan kuesioner, dilakukan uji validasi dan realibilitas menggunakan aplikasi SPSS 2013. Uji validitas dan reabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur keakuratan variabel yang terkait dengan fungsinya dalam suatu penelitian. Uji ini juga dilakukan untuk menguji keakuratan indikator yang ditentukan yang berkontribusi pada faktor yang ditentukan. Menguji validitas dan reabilitas kuesioner untuk menentukan apakah dapat didistribusikan dalam survei ini sebagai alat pengumpulan data utama. Perhitungan pengaruh berdasarkan skala *likert* dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel penyebab terbentuknya perilaku secara keseluruhan.

Tabel 1. Kategori Jawaban Menurut Skala

Kategori	Skala
Sangat Berpengaruh (SB)	5
Berpengaruh (B)	4
Netral (N)	3
Tidak Berpengaruh (TB)	2
Sangat Tidak Berpengaruh (STB)	1

Menentukan jumlah pembobotan dan nilai indeks berdasarkan skala *likert* sebagai berikut : Jumlah pembobotan = (Nilai Skala * Skala Jawaban) + ... + (Nilai Skala * Skala jawaban).

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{Jumlah Pembobotan}}{\text{Nilai Skala}}$$

Kemudian dari hasil perhitungan setiap variabel menggunakan skala *likert* dihitung kembali menggunakan rumus mean.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden untuk kuisioner ini adalah pekerja proyek pembangunan di proyek Pembangunan Gedung Auditorium dan Gedung Perkuliahan FKIP UM Buton. Jumlah dari keseluruhan responden adalah 47 orang keseluruhan berjenis kelamin pria. Usia pekerja antara 20-43 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Usia Pekerja

Tingkat Usia Pekerja	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
20-25 tahun	15	31,91

26-30 tahun	10	21,28
31-35 tahun	18	38,30
36-40 tahun	3	6,38
>41 tahun	1	2,13
Total	47	100

Hasil dari survei tingkat pendidikan pekerja menunjukkan kebanyakan pekerja merupakan lulusan SMA sebanyak 36 orang, SMP sebanyak 10 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Respoden

Tingkat Pendidikan Pekerja	Jumlah (orang)	Presentase (%)
SD	1	2,13
SMP	10	21,28
SMA	36	76,60
Perguruan Tinggi	0	0
Total	47	100

Jumlah 47 rangkap kuesioner yang disebarkan kepada pekerja seluruhnya kembali karena peneliti turut mendampingi dalam proses pengisian koesioner. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengembalian kuesioner

Responden	Kuesioner		Tingkat Pengembalian (%)
	Disebarkan	Dikembalikan	
Pekerja	47	47	100

Cara untuk menguji keefektifan adalah dengan membandinngkan r hitung dan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka butir tersebut di katakan valid dan jika yang terjadi adalah sebaliknya maka item dikatakan tidak valid. Nilai r hitung dicari menggunakan program aplikasi SPSS 2013, sedangkan nilai r tabel merupakan nilai r ketetapan. Untuk distribusi nilai r tabel yang digunakan peneliti yaitu N = 47 dengan nilai r tabel 5% = 0,288 dan nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05.

Tabel 5. Hasil uji validitas item 1 menggunakan SPSS 2013

Item	r hitung	r tabel (5%)	Sig	Kreteria
1	0,550	0,288	0	Valid
2	0,383	0,288	0,008	Valid
3	0,381	0,288	0,008	Valid
4	0,676	0,288	0	Valid
5	0,456	0,288	0,001	Valid
6	0,307	0,288	0,036	Valid

7	0,374	0,288	0,010	Valid
8	0,528	0,288	0	Valid
9	0,507	0,288	0	Valid

Tabel 6. Hasil uji validitas item 2 menggunakan SPSS 2013

Item	r hitung	r tabel (5%)	Sig	Kreteria
1	0,723	0,288	0	Valid
2	0,944	0,288	0	Valid
3	0,488	0,288	0	Valid
4	0,679	0,288	0	Valid

Tabel 7. Hasil uji validitas item 3 menggunakan SPSS 2013

Item	r hitung	r tabel (5%)	Sig	Kreteria
1	0,731	0,288	0	Valid
2	0,575	0,288	0	Valid
3	0,714	0,288	0	Valid
4	0,738	0,288	0	Valid

Tabel 8. Hasil uji validitas item 4 menggunakan SPSS 2013

Item	r hitung	r tabel (5%)	Sig	Kreteria
1	0,743	0,288	0	Valid
2	0,514	0,288	0	Valid
3	0,845	0,288	0	Valid
4	0,711	0,288	0	Valid

Tabel 9. Hasil uji validitas item 5 menggunakan SPSS 2013

Item	r hitung	r tabel (5%)	Sig	Kreteria
1	0,865	0,288	0	Valid
2	0,744	0,288	0	Valid
3	0,611	0,288	0	Valid

Tabel 10. Hasil uji validitas item 6 menggunakan SPSS 2013

Item	r hitung	r tabel (5%)	Sig	Kreteria
1	0,650	0,288	0	Valid
2	0,830	0,288	0	Valid
3	0,712	0,288	0	Valid
4	0,828	0,288	0	Valid
5	0,788	0,288	0	Valid
6	0,846	0,288	0	Valid
7	0,832	0,288	0	Valid
8	0,607	0,288	0	Valid
9	0,850	0,288	0	Valid
10	0,733	0,288	0	Valid

Tabel 11. Hasil uji validitas item 7 menggunakan SPSS 2013

Item	r hitung	r tabel (5%)	Sig	Kreteria
1	0,477	0,288	0,001	Valid
2	0,964	0,288	0	Valid
3	0,94	0,288	0	Valid
4	0,972	0,288	0	Valid
5	0,713	0,288	0	Valid
6	0,966	0,288	0	Valid
7	0,870	0,288	0	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan dari uji validitas pada seluruh item kuesioner maka didapatkan r hitung dari setiap pertanyaan telah memenuhi syarat yaitu r hitung dari setiap pertanyaan dalam setiap item lebih besar dari r tabel sehingga pertanyaan dalam keseluruhan item ini telah dinyatakan valid.

Cara melakukan uji reliabilitas adalah dengan membandingkan angka cronbach alphan dengan ketentuan nilai *cronbach alphan* adalah minimal 0,6. Jika nilai *cronbach alphan* hitung lebih da nilai *cronbach alphan* ketentuan bisa di simpulkan kuesioner telah reliabel, sedangkan jika nilai *cronbach alphan* hitung lebih kecil dari nilai cronbach ketentuan maka kuesioner tersebut tidak reliabel.

Tabel 12. Hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS 2013

Item	Cronbach's Alphan	N of Item	Kreteria
1	0,664	9	Reliabel
2	0,698	4	Reliabel
3	0,631	4	Reliabel
4	0,608	4	Reliabel
5	0,636	3	Reliabel
6	0,912	10	Reliabel
7	0,926	7	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, didapatkan hasil *cronbach alphan* dari setiap variabel telah memenuhi syarat yaitu nilai cronbach alphan hitung lebih besar dari cronbach alphan ketentuan yaitu 0,6 sehingga dinyatakan reliabel. Hasil rekapitulasi diatas menunjukkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi perilaku pekerja yang pertama adalah manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan nilai mean 797,11. Hal ini menunjukkan bahwa dengan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang baik dan teratur maka perilaku pekerja dapat terbentuk dengan baik pula karena pekerja akan selalu mengikuti semua arahan yang telah diberikan oleh pihak manajemen.

Kedua adalah kompetensi pekerja dengan nilai mean 229,75. Hal ini menunjukkan

bahwa jika pekerja memiliki kompetensi dalam hal pekerjaan proyek maka dengan kompetensi inilah pekerja dapat berperilaku aman saat bekerja karena telah terbiasa dan mengetahui resiko-resiko yang ada di dalam pekerjaan proyek. Ketiga adalah keterlibatan pekerja dengan nilai mean 224,667. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pekerja juga berpengaruh terhadap perilaku pekerja karena dengan aktif terlibat dalam hal kesehatan dan keselamatan seperti sadar terhadap bahaya yang ada di tempat kerja selama bekerja, paham terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga selalu menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja maka pekerja akan selalu berperilaku aman ketika sedang bekerja.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dari hasil analisa yang dilakukan ada beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa variabel utama yang mempengaruhi perilaku pekerja pada proyek pembangunan gedung UM Buton yaitu manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan nilai mean 797,11, peraturan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dengan nilai mean 217,25, komunikasi dengan nilai mean 216,75, kompetensi pekerja dengan nilai mean 229,75, keterlibatan pekerja dengan nilai mean 224,667, lingkungan kerja dengan nilai mean 223,10 dan perilaku pekerja dengan nilai mean 175,00. Dari hasil penelitian diketahui pengaruh yang paling tinggi dalam pembentuk perilaku pekerja adalah bahwa manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan nilai mean yang paling tertinggi yaitu 797,11 hal ini menunjukkan bahwa manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku pekerja, yang kedua adalah kompetensi pekerja dengan nilai mean 229,75 sehingga dengan kompetensi yang telah dimiliki pekerja akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing, yang ketiga adalah keterlibatan pekerja dengan nilai mean 224,667 dengan saling terlibat pekerja akan bekerja dengan lebih produktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Chomiarti, D. (2011). Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berbasis Perilaku pada Pekerja Konstruksi. *Tugas Akhir. Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Christina, W. Y., Ludfi, D., & Thoyib, A. (2012). Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. *Jurnal Rekayasa Sipil.*
- Geller, E. S. (2017). Working safe: How to help people actively care for health and safety,

- second edition. In *Working Safe: How to Help People Actively Care for Health and Safety, Second Edition*. <https://doi.org/10.1201/9781315273983>
- Husni, L. (2000). *Lalu Husni Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. In *PT Rajagrafindo Persada, Jakarta*.
- Moleong, L. J. (2010). *Meode Penelitian Kualitatif*. In *PT Remaja Rosdakarya* (Vol. 53, Issue 9).
- Reason, J. (2016). *Managing the risks of organizational accidents*. In *Managing the Risks of Organizational Accidents*. <https://doi.org/10.4324/9781315543543>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Silalahi, B. N. B & Silalahi, R. B. (1995). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.



Loyalitas Merek Milo Ditinjau dari Kualitas Produk dan *Brand Image*

Ella Anastasya Sinambela^{1*}, Rahayu Mardikaningsih²
easinambela@gmail.com^{1*}, rahayumardikaningsih@gmail.com²

^{1,2}Program Studi Manajemen
^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya

Received: 03 02 2022. Revised: 28 03 2022. Accepted: 05 04 2022.

Abstract : One of the roles of marketing management is to win the market competition. This situation will make the company's sales increase and ultimately provide profits for the company. In addition, market competition also occurs to attract consumers' attention. The marketing strategy implemented by the company's management aims to build brand loyalty from consumers. Therefore, marketing managers improve the forming aspects of brand loyalty. This study aims to determine the role of product quality and brand image to build brand loyalty. The method applied is a quantitative method, then the data is processed using the SPSS V.25 application. The population used is the consumer of Milo brand milk in the city of Surabaya. The sampling technique was accidental sampling with a total of 100 respondents. This study shows that brand loyalty is influenced by product quality and brand image.

Keywords : Brand image, Product quality, Brand loyalty.

Abstrak : Salah satu peran dari manajemen pemasaran adalah untuk memenangkan persaingan pasar. Situasi ini akan membuat penjualan perusahaan meningkat dan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu persaingan pasar juga terjadi untuk menarik perhatian konsumen. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh manajemen perusahaan bertujuan untuk membangun loyalitas merek dari konsumen. Oleh karena itu manajer pemasaran meningkatkan aspek pembentuk dari loyalitas merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari kualitas produk dan brand image untuk membangun loyalitas merek. Metode yang diterapkan merupakan metode kuantitatif, lalu data diolah menggunakan aplikasi SPSS V.25. Populasi yang digunakan yakni konsumen dari susu merek Milo di Kota Surabaya. Teknik penarikan sampel adalah accidental sampling dengan jumlah 100 responden. Penelitian ini menunjukkan loyalitas merek dipengaruhi oleh kualitas produk dan brand image.

Kata Kunci : *Brand image*, Kualitas produk, Loyalitas merek.

PENDAHULUAN

Umumnya sebuah perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran pemasaran. Penerapan strategi pemasaran yang diterapkan memerlukan perencanaan yang tepat juga. Perencanaan ini dilakukan sesuai dengan kondisi pasar. Saat ini pasar juga bersaing untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen terhadap merek

dari perusahaan. Situasi ini harus terus dipertahankan karena persaingan di dunia usaha saat ini cukup ketat. Permintaan antara barang atau jasa memiliki jumlah yang sama sehingga perusahaan harus menentukan pilihan yang memberikan keuntungan lebih besar. Perusahaan harus selalu dapat diandalkan dalam merumuskan strategi pemasaran, terus meningkatkan kualitas produk, dan selalu berinovasi untuk memenuhi keinginan pelanggan, dengan selalu mengikuti perkembangan saat ini guna mempertahankan keunggulan bersaing barang atau jasa yang dimiliki agar selalu dapat bersaing. Perusahaan akan menghadapi persaingan pasar bukan hanya bersaing untuk meningkatkan produk tetapi juga untuk menarik konsumen. Untuk menjaga posisi perusahaan pada pasar maka perusahaan membentuk loyalitas merek.

Untuk mendapatkan loyalitas merek tidak bisa diperoleh pada waktu singkat. Perusahaan perlu membangunnya dengan perencanaan dan strategi yang tepat. Loyalitas merek dapat terjadi akibat pengalaman yang dirasakan oleh konsumen pada saat mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh suatu merek. Produk yang dikonsumsi dari merek tersebut bukan hanya dari satu produk saja melainkan beberapa produk. Penguatan loyalitas merek membuat perusahaan memiliki tempat tersendiri dalam pasar. Konsumen akan selalu memilih merek yang dipercaya meskipun merek pesaing memberikan kelebihan (Bigdeloo, 2002). Untuk membangun loyalitas merek pada konsumen maka peningkatan kualitas produk juga dilakukan.

Pengalaman konsumen akan kualitas produk dari suatu merek memunculkan loyalitas terhadap merek tersebut. Yuen dan Chan (2010) menjelaskan terdapat pertimbangan dan penurunan loyalitas konsumen yang secara substansial dipengaruhi oleh kualitas suatu produk yang diberikan. Produk yang memberikan manfaat dan memiliki kualitas yang tinggi menimbulkan kepercayaan pada konsumen. Persepsi dari sebuah produk yang ditawarkan memiliki pengaruh yang tinggi pada loyalitas (Darmawan, 2017). Konsumen yang memiliki frekuensi tinggi untuk menggunakan produk atau layanan dengan teratur pada jangka waktu yang panjang memungkinkan untuk timbul kepercayaan akan produk tersebut (Ferrinadewi, 2004). Konsumen lama yakin bahwa produk yang digunakan memiliki keunggulan kompetitif atas produk pesaing.

Loyalitas merek juga dapat timbul dari brand image yang diberikan. Darmawan (2004) menjelaskan adanya pengaruh yang baik, dan memiliki keterikatan kuat dari brand image terhadap loyalitas merek. Pernyataan ini didukung oleh Purnamasari (2002), loyalitas pelanggan adalah penentuan pelanggan yang menggunakan barang atau jasa secara konsisten, dan bahwa pelanggan akan merekomendasikan orang lain untuk produk yang telah dibeli sehingga baik brand image pada akhirnya dapat membentuk pelanggan yang loyal. Brand image

yang baik memungkinkan orang untuk membedakan suatu produk dari produk lain, mempengaruhi keputusan pembelian dan bahkan loyalitas merek. Brand image yang baik membuat konsumen percaya pada produk dari merek tersebut yang pada akhirnya akan membentuk loyalitas merek. Pilihan pelanggan, yang pada akhirnya mengarah pada bentuk loyalitas untuk selalu menggunakan barang atau jasa secara terus menerus, yang berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan. Pelanggan loyal merupakan aset perusahaan, karena merupakan aspek penting dalam peningkatan bisnis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh brand image dan kualitas produk terhadap loyalitas merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif, yang merupakan suatu proses dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan mengembangkan fenomena dengan memakai data terfokus dari data numerik. Penelitian ini mencari kualitas produk sebagai variabel bebas pertama dan brand image sebagai variabel bebas kedua terhadap loyalitas merek sebagai variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Definisi operasional untuk kualitas produk merupakan keseluruhan karakter suatu barang atau jasa yang melengkapi kualitas atau nilai tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen (Kotler & Keller, 2016). Menurut Mardikaningsih (2020) kualitas produk adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh semua bisnis jika mereka ingin barang mereka bersaing di pasar. Sehingga dapat dijelaskan kualitas produk sebagai ciri suatu barang atau jasa yang harus diperhatikan oleh semua pelaku usaha agar dapat memenuhi hasil barang atau jasa yang sesuai dengan harapan yang dimiliki pelanggan. Selanjutnya, hubungan timbal balik antara konsumen dan perusahaan diperlukan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang keinginan dan kebutuhan klien berdasarkan persepsi pelanggan (Bartikowski et al., 2010).

Mardikaningsih dan Sinambela (2016) menjelaskan citra atau image sebagai uraian yang berhubungan dengan asosiasi dan kepercayaan pelanggan terhadap merek yang ada. Citra yang baik dari beberapa merek adalah suatu aset, karena citra mempunyai dampak kuat ingatan pelanggan dari komunikasi dalam berbagai hal (Setyaningsih, 2004). Brand image juga dikatakan sebagai suatu hal yang esensial karena sebagai acuan untuk menentukan kepercayaan pelanggan, serta memiliki peranan dalam pengambilan keputusan pembelian. Nama, lambang, dan bentuk yang berkombinasi. Hal ini untuk menetapkan pembeda barang atau jasa dari penjual lainnya (Kotler & Keller, 2016).

Loyalitas merek sering dikaitkan dengan perilaku pembelian berulang terhadap merek yang sama (Rundle-Thiele & Maio, 2001). Pembelian kembali adalah pembelian yang telah dilakukan tetapi dilakukan lagi dan lebih dari sekali. Pembelian berulang dapat dikaitkan dengan insentif berkala untuk mendorong dan mengundang pelanggan untuk membeli kembali barang atau jasa merek serupa (McMullan & Gilmore, 2008). Salah satu perintah bagi perusahaan untuk bertahan dalam bisnis adalah adanya pelanggan yang loyal. Loyalitas pelanggan adalah suatu kondisi di mana pelanggan atau konsumen mengambil tindakan atau membuat komitmen yang mendalam untuk menggunakan barang atau jasa tanpa batas di masa depan tanpa paksaan apapun, meskipun pengaruh keadaan yang kemudian dapat menyebabkan pelanggan untuk beralih (Kotler & Keller, 2016).

Penelitian ini menggunakan data primer, sebagai sumber data. Data primer merupakan data yang asal usulnya didapat dari sumber asli terkait yang relevan dengan topik yang diambil atau diangkat. Untuk melengkapi pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya data informasi perusahaan yang bersifat internal maupun eksternal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menyediakan pernyataan kepada sejumlah orang atau responden untuk menjawabnya, dan informasi yang didapat pada kuesioner biasanya lebih mendetail.

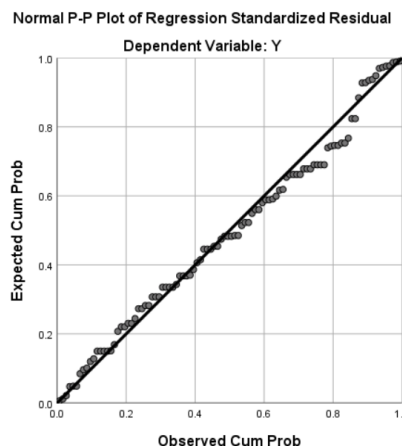
Populasi pada penelitian ini adalah konsumen susu merek Milo yang tidak diketahui jumlahnya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Sampel dalam penelitian ini diolah dengan teknik non-probabilitas, artinya tidak seluruh populasi diberi pilihan untuk menjadi sampel dalam rangka menetapkan variabel tersebut. Ini adalah penelitian asosiatif, yang berarti melihat bagaimana dua atau lebih variabel terkait satu sama lain. Peneliti menggunakan skala likert 5 poin, dengan poin 1 menunjukkan "sangat setuju", poin 2 menunjukkan "setuju", poin 3 menunjukkan "netral", poin 4 menunjukkan "tidak setuju", dan poin 5 menunjukkan "tidak setuju".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden pada penelitian ini sejumlah 100 responden. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 68 orang (68%) serta sisanya sejumlah 32 orang (32%) merupakan responden laki-laki. Latar belakang pendidikan menunjukkan responden merupakan lulusan SMA sebanyak 34 responden (34%) serta lulusan perguruan tinggi pada jenjang Strata satu (S1) yang berjumlah 66 responden (66%). Berdasarkan tingkat usia, responden terbanyak berada pada rentan usia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 46

responden (46%). Sedangkan responden paling sedikit merupakan konsumen yang berusia di atas 55 tahun yaitu berjumlah 3 responden (3%). Pada penelitian ini seluruh responden memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Paling banyak responden memiliki pendapatan antara dibawah Rp 5.000.000 dengan jumlah 43 responden (43%). Pada tingkat kedua, responden miliki pendapatan antara Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 yaitu sebanyak 30 responden (30%). Selanjutnya paling sedikit responden memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000 sebanyak 27 responden (27%).

Data pada penelitian ini sebelumnya diuji kualitasnya dengan uji validitas. Tentang variabel kualitas produk terdapat 8 pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berikutnya seluruh pernyataan mengenai loyalitas merek yang berjumlah enam pernyataan dinyatakan valid. Pernyataan mengenai variabel brand image memiliki 8 pernyataan valid dari 10 pernyataan yang disajikan. Berdasarkan uji reliabilitas, Untuk nilai CR variabel kualitas produk didapatkan sebesar 0,786 sehingga dapat dinyatakan reliabel. Nilai CR pada variabel brand image didapatkan sebesar 0,856 dan ini menunjukkan reliabel. Nilai CR sebesar 0,822 untuk variabel loyalitas merek dan ini menunjukkan reliabel. Tahap berikutnya dilakukan uji normalitas yang ditampilkan pada gambar 1.

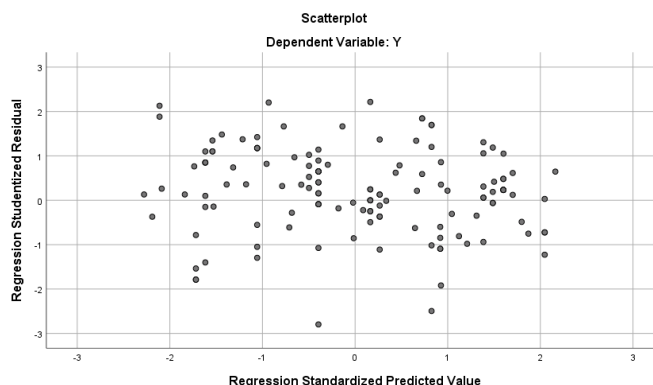


Gambar 1. Uji Normalitas

Pada diagram normal *P-P plot regression standardized*, eksistensi titik-titik terlihat menyebar disekitar garis dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal meskipun titik menyebar tidak sejajar dengan garis. Pola ini menunjukkan nilai residual tersebut terdistribusi normal.

Berikutnya dilakukan uji multikolinearitas. Nilai cutoff yang digunakan sebagai petunjuk terdapatnya multikolinieritas adalah tolerance, jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Penelitian ini menunjukkan nilai VIF untuk kedua variabel sebesar 1.158 serta nilai tolerance 0,863. Angka yang didapat

menunjukkan penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Berikutnya dilakukan uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Nilai DW yang didapatkan 1,910 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji selanjutnya merupakan uji heteroskedastisitas. Hasil uji ini ditampilkan pada gambar 2. Sebaran data yang ada pada gambar 2 memperlihatkan data menyebar merata pada sumbu Y. selain itu hasil uji ini menunjukkan gambar yang tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu penelitian ini dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Dari uji kualitas data, dapat disimpulkan data penelitian ini baik dan dapat diproses pada tahapan berikutnya.

Tabel 1. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 ^a	.644	.636	3.749	1.910

Tahapan berikutnya merupakan uji koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan penelitian ini memperoleh nilai R sebesar 0,802. Sedangkan nilai R Square yang diperoleh adalah 0,644. Nilai ini menunjukkan adanya kontribusi sebesar 64,4% dari kualitas produk serta brand image pada loyalitas merek. Loyalitas merek juga dipengaruhi oleh variabel lainnya bukan menjadi variabel yang diteliti sebesar 35,6%.

Tabel 2. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2462.047	2	1231.024	87.565	.000 ^b
	Residual	1363.663	97	14.058		
	Total	3825.710	99			

Berikutnya dilakukan uji F. Berdasarkan nilai yang disajikan pada tabel Anova, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 87,565 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil ini sesuai dengan batasan nilai yang digunakan. Hal ini menunjukkan pada pembentukan loyalitas merek terdapat peran signifikan dari kualitas produk dan brand image secara bersama-sama.

Tabel 3. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	28.265	2.594		10.897	.000	
	X.1	2.647	.358	.483	7.401	.000	.863 1.158
	X.2	2.728	.366	.487	7.458	.000	.863 1.158

Berdasarkan tabel *Coefficients* diketahui nilai signifikan untuk variabel X.1 yaitu kualitas produk sebesar 0,000. Berdasarkan batas nilai yang digunakan yaitu tidak melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan kualitas produk memberikan pengaruh signifikan pada pembentukan loyalitas merek. Selanjutnya untuk brand image diketahui mendapatkan nilai signifikan 0,000 sehingga lebih rendah dari batas nilai 0,05. Angka ini mengartikan loyalitas merek dipengaruhi oleh brand image. Berikutnya didapatkan model regresi yaitu $Y = 28,265 + 2,647X.1 + 2,728X.2$. Hasil ini menunjukkan nilai loyalitas merek akan bernilai 28,265 jika nilai dari kualitas produk dan brand image bernilai 0.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh signifikan pada naik turunnya loyalitas merek. Temuan ini memperkuat temuan dari penelitian Darmawan (2004) dan Yuen dan Chan (2010). Peningkatan kualitas produk akan membuat konsumen menjadi lebih yakin kepada sebuah merek. Konsumen menganggap bahwa merek tersebut akan selalu memberikan produk terbaik dengan kualitas yang akan selalu meningkat setiap waktu.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peran signifikan dari brand image pada pembentukan loyalitas merek. Dengan melakukan peningkatan brand image maka persepsi masyarakat akan semakin kuat terhadap brand tersebut. Perusahaan menerapkan strategi pemasaran untuk memperkuat brand image pada ingatan konsumen. Pernyataan ini memperkuat hasil studi Darmawan (2017). Kualitas produk dan brand image memberikan dampak positif pada loyalitas merek. Peningkatan loyalitas merek dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dan memperkuat brand image. Konsumen akan selalu mengingat merek tersebut dan percaya kualitas produk yang diproduksi oleh merek tersebut. Peningkatan loyalitas merek akan memperkuat posisi perusahaan pada persaingan pasar.

SIMPULAN

Temuan-temuan berikut dapat diambil dari penelitian tersebut di atas: pertama, ada ada pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas merek. Meskipun ada kekhawatiran dan penurunan terkait dengan loyalitas merek yang sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang diberikan, pelanggan akan merasa yakin jika produk yang tersedia berkualitas baik dan bermanfaat.

Kedua, pengaruh citra merek terhadap loyalitas merek Milo. Pelanggan yang menggunakan merek secara teratur percaya bahwa merek tersebut memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan pesaing. Ketiga, terdapat pengaruh simultan citra merek dan kualitas produk terhadap loyalitas merek. Semakin baik citra merek dan kualitas barang yang diberikan, semakin tinggi loyalitas merek.

Menurut temuan penelitian di atas, citra merek memiliki peran dalam menentukan persepsi pelanggan terhadap suatu produk sehingga timbul keinginan untuk membeli, yang mengarah pada korelasi dengan loyalitas merek. Perusahaan diyakini dapat mempertahankan citra mereknya karena Milo adalah merek kuat di pasar. Perusahaan, di sisi lain, harus terus meningkatkan kualitas produk dan intensitas iklan agar barang dapat dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari pembeli beralih ke produk sejenis dengan merek yang berbeda. Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan lebih banyak variabel independen, seperti promosi, gaya hidup, harga, sikap pelanggan, dan lain-lain, yang dapat mempengaruhi loyalitas merek.

DAFTAR RUJUKAN

- Aaker, D. (2007). *Managing brand equity*. Free Press. New York.
- Alkhalaf, A. M., & B. M. Eneizan. (2018). Factors Influencing Brand Loyalty in Durable Goods Market. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(1), 326-339.
- Bartikowski, B., Kamei, K., & Chandon, J. L. (2010). A verbal rating scale to measure Japanese consumers' perceptions of product quality. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 22(2), 179-195.
- Bigdeloo, M. 2002. Brand. *Specialized Monthly Journal of Marketing*. 16, 41-49.
- Cassia, F., N. Cobelli., & M. Ugolini. (2017). The Effects of Goods-Related and Service-Related B2B Brand Images on Customer Loyalty. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 32(5), 722-732.
- Darmawan, D. 2004. Pengaruh Persepsi Kualitas Layanan, Citra Merek, dan Kepuasan Nasabah terhadap Respon Perilaku Nasabah, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 33-47.
- Darmawan, D. 2010. *Manajemen Pemasaran*, IntiPresindo Pustaka, Bandung
- Darmawan, D. 2017. *Bauran Pemasaran Ritel, Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan*. Metromedia, Surabaya.

- Darmawan, D., R. Mardikaningsih., S. Arifin., & M. Hariani. (2019). Upaya Memperkuat Citra Ramayana Departemen Toko Melalui Promosi Penjualan Dan Periklanan. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi (Akuntabilitas)*, 12(1), 59-71.
- Darmawan, D., S. Arifin. (2021). Studi Empiris tentang Perilaku Konsumen Produk Air Minum dalam Kemasan ditinjau dari Variabel Harga dan Kesadaran Merek. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Budaya (IDEAS)*, 7(3), 179-186.
- Ernawati & D. Darmawan. (2017). Korelasi Lokasi Dan Promosi Dengan Keputusan Pembelian Rumah Subsidi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 1-7.
- Ferrinadewi, E. & D. Darmawan. 2004. *Perilaku Konsumen: Analisis Model Keputusan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hongfang, Z., & L. Weihua. 2009. An Empirical Study on the Factor Influencing Brand Loyol. *International Conference on Electronic Commerce and Business Intelligence*, 483-485.
- Iskandar, M. & D. Darmawan. 2003. *Strategi Pemasaran*, IntiPresindo Pustaka, Bandung.
- Khasanah, H., S. Arum, D. Darmawan. 2010. *Pengantar Manajemen Bisnis*, Spektrum Nusa Press, Jakarta.
- Kotler, P. & K. L. Keller. 2016. *Marketing Management*. 15th Ed. Pearson Pretice Hall, Inc. New Jersey.
- Mardikaningsih, R. & D. Darmawan. 2020. *Sistem Pengendalian Mutu*, Metromedia.
- Mardikaningsih, R. & E. A. Sinambela. 2016. Peranan Komunikasi Pemasaran, Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap Kesetiaan Merek, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 33-52.
- McMullan, R., & Gilmore, A. (2008). Customer loyalty: An empirical study. *European Journal of Marketing*, 42 (9/10), 1084-1094.
- Purnamasari, E., D. Darmawan, & D. Baskara. 2002. Bauran Pemasaran dan Kualitas Layanan serta Pengaruhnya terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 3(1), 34-46.
- Rundle-Thiele, S., & Maio, M. M. (2001). Assessing the performance of brand loyalty measures. *Journal of Services Marketing*, 15 (7), 529-546
- Setyaningsih & D. Darmawan. 2004. Pengaruh Citra Merek terhadap Efektifitas Iklan, *Jurnal Media Komunikasi Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 41-49.
- Sinambela, E. A. 2017. Pengaruh Ekuitas Merek dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Kopi Bubuk Kemasan, *Management & Accounting Research Journal*, 1(2), 44-49.

- Sinambela, E. A., P. P. Sari., & S. Arifin. (2020). Pengaruh Variabel Harga dan Citra Perusahaan terhadap Keputusan Pembelian Produk Wingsfood. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi (Akuntabilitas)*, 13(1), 55-70.
- Sinambela, E. A., Y. R. Al Hakim, & H. D. Hahury. 2019. Pengaruh Citra Merek dan Gaya Hidup terhadap Sensitivitas Harga, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, 1(1), 9-15.
- Yuen, EFT. & Chan, SSL. 2010. The Effect of Retail Service Quality and Product Quality on Customer Loyalty. *Database Marketing & Customer Strategy Management*. 17(3/4), 222–240.



Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Arus Lalu Lintas

Muhammad Chaiddir Hajia

muhammadchaiddir@gmail.com

Program Studi Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Buton

Received: 06 03 2022. Revised: 08 04 2022. Accepted: 21 04 2022

Abstract : On the island of Sulawesi, there is an area called Buton Regency which is located on the largest island outside Sulawesi, namely Buton Island. The capital of the archipelago is in Pasarwajo (Pasarwajo). Pasarwajo (Pasarwajo) which is one of the sub-districts in Buton Regency, Southeast Sulawesi, has developed economically and socially, but also in the form of utilization of urban space. This research is first conducted to identify traffic problems in Sabho Market from the identification and formulation stages of the problem, then proceed with a traffic survey to see the existing condition of the road and get the traffic volume. After completing the survey, the final stage is data processing to obtain traffic volume using the 1997 MKJI method. This research was conducted for 3 days starting from 06.00 – 15.00 WITA with the research time interval being taken for 15 minutes and the type of road is 2/2 UD. From the results of research and discussions that have been carried out, it is found that traffic behavior for Jalan Anoa, Baubau City with the type of road 2 lanes 2 directions (2/2 UD), the category of inner city roads, has a type B road service level with a traffic volume of 819, 4 smp/hour using the 1997 MKJI method and 819.4 cur.

Keywords : MKJI 1997, Sabho market, Wajo market.

Abstrak : Di Pulau Sulawesi yang luas terdapat satu daerah yang bernama Kabupaten Buton yang terletak di pulau terbesar di luar Pulau Sulawesi yaitu Pulau Buton. Ibu kota nusantara berada di Pasarwajo (Pasarwajo). Pasarwajo (Pasarwajo) yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, telah berkembang secara ekonomi dan sosial, namun juga dalam bentuk pemanfaatan ruang kota. Penelitian ini pertamanya dilakukan pengindetifikasi masalah lalu lintas yang ada di Pasar Sabho dari tahap indentifikasi dan perumusan masalah, maka dilanjutkan dengan survey lalu lintas untuk melihat kondisi eksisting jalan dan mendapatkan volume lalu lintas. Setelah selesai survey masuk pada tahap akhir yaitu pengolahan data untuk mendapatkan volume lalu lintas dengan menggunakan metode MKJI 1997. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari dimulai dari jam 06.00 – 15.00 WITA dengan interval waktu penelitian diambil selama 15 menit dan tipe jalan yaitu 2/2 UD. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan didapat perilaku lalu lintas untuk ruas Jalan Anoa Kota Baubau dengan jenis jalan 2 lajur 2 arah (2/2 UD), kategori jalan dalam kota, memiliki tingkat pelayan jalan tipe B dengan volume lalu lintas sebesar 819, 4 smp/jam dengan menggunakan metode MKJI 1997 dan 819,4 skr.

Kata Kunci : MKJI 1997, Pasar sabho, Pasar wajo.

PENDAHULUAN

Di Pulau Sulawesi yang luas terdapat satu daerah yang bernama Kabupaten Buton yang terletak di pulau terbesar di luar Pulau Sulawesi yaitu Pulau Buton. Ibu kota nusantara berada di Pasarwajo (Pasarwajo). Pasarwajo (Pasarwajo) yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, telah berkembang secara ekonomi dan sosial, namun juga dalam bentuk pemanfaatan ruang kota. Indikator yang membuktikan pesatnya perkembangan di Pasarwajo adalah munculnya berbagai pusat perbelanjaan, salah satunya adalah Pasar Sabo. Pasar Sabo terletak di Kelurahan Saragi dan merupakan pasar tradisonal sebagai tempat berkumpulnya para pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat di Pasarwajo. Pasar Sabo memiliki terminal dengan luas parkir untuk kendaraan mobil seluas 100 x 15 meter dan kendaraan bermotor seluas 30 x 3 meter dengan lebar jalan 6 meter.

Dari beberapa hasil penelitian seperti Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2016) Universitas Halu Oleo dengan judul skripsi Analisa Lalulintas pada Kawasan Lippo Plaza (Studi Kasus Jalan M.T Haryono, Kota Kendari). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan berdasarkan nilai volume lalulintas, derajat kejenuhan (DS) dan tingkat pelayanan dimana Berdasarkan survei dan perhitungan kinerja ruas jalan M.T Haryono maka didapatkan volume lalulintas pada hari senin dan hari sabtu. Dimana pada hari senin didapatkan dengan waktu puncak tertinggi yaitu pagi hari jam 09:00-10:00, siang hari jam 11:00-12:00 dan sore hari jam 17:00-18:00. Dengan arus total kendaraan pada hari senin sebesar 1636,5333 smp/jam, kapasitas sebesar 4619,16 smp/jam dan Derajat Kejenuhan (DS) sebesar 0,35. Sedangkan pada hari sabtu didapatkan dengan waktu puncak tertinggi yaitu pagi hari jam 08:00-09:00, siang hari jam 11:00-12:00 dan sore hari jam 17:00-18:00. Arus total kendaraan sebesar 1703,7333 smp/jam, kapasitas sebesar 4619,16 smp/jam dan derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,37. Berdasarkan tingkat pelayanan yang didapatkan pada perhitungan, kondisi pada hari senin total rata-rata volume kendaraan yaitu 1636,533 dan kapasitas 4619,16 sehingga menghasilkan tingkat pelayanan yaitu 0,35 dengan tingkat pelayanan B. Pada hari senin total rata-rata volume kendaraan yaitu 1703,733 dan kapasitas 4619,16 sehingga menghasilkan tingkat pelayanan yaitu 0,37 dengan tingkat pelayanan B.

Studi yang dilakukan oleh Abdul Rahman (2013) dari Fakultas Teknik Universitas Warmadewa, bernama Studi Analisis Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus: Jalan Watuengong Kota Denpasar). Berdasarkan analisis volume lalu lintas jalan raya Jinggong disimpulkan

bahwa kapasitas eksisting Jalan Raya Jinggong sudah tidak dapat lagi menampung arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut. Berdasarkan analisis kapasitas lokasi penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kapasitas dasar (C) Jalan Wugonggong adalah 1.795 smp / jam, yang tidak memenuhi persyaratan MKJI 1997, menurut MKJI 1997 ($C \geq 2900$). Saturasi (DS) Wugong Gonglu adalah 0.85 yang berarti tidak memenuhi persyaratan MKJI 1997, menurut MKJI 1997 ($DS \leq 0.75$). Tingkat pelayanan Jalan Wanxinggong berada di kelas E (0.85-1.00).

Persamaan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode "Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997" untuk menganalisis parameter nilai kapasitas (C) dan tingkat pelayanan (LoS-Level of Service). Dilakukan oleh Abdul Rahman dan mengkaji analisis kinerja jalan (studi kasus: Jalan Waturenggong di Kota Denpasar). Dalam penelitian saya, saya meninjau lalu lintas di area pasar Saab dan menganalisis lalu lintas (T). Sistem merupakan suatu variabel yang dihubungkan dan dihubungkan dalam suatu urutan yang terstruktur, dan transportasi mengandung arti suatu kegiatan perpindahan baik memindahkan barang maupun penumpang dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Berdasarkan definisi sistem dan transportasi diatas, maka sistem transportasi merupakan keterkaitan dan keterpaduan berbagai variabel yang termasuk dalam kegiatan memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat menuju tempat lainnya (Munawar, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pertama-tama dilakukan pengidentifikasi masalah lalu lintas yang ada di Pasar Sabho. Selanjutnya penentuan masalah yang terjadi di area tersebut kemudian perumusan masalah yang akan dijadikan penelitian. Melakukan studi literatur terhadap masalah yang telah didapat sehingga mendapat ruang lingkup pembahasan pada penelitian. Setelah semua selesai dari tahap indentifikasi dan perumusan masalah, maka dilanjutkan dengan survey lalu lintas untuk melihat kondisi eksisting jalan dan mendapatkan volume lalu lintas. Setelah selesai survey masuk pada tahap akhir yaitu pengolahan data untuk mendapatkan volume lalu lintas dengan menggunakan metode MKJI 1997 sehingga bisa memperoleh tingkat pelayanan jalan yang ada di Pasar Sabho

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat volume lalu lintas sebagai berikut.

Tabel 1. Data volume lalu lintas pada hari senin

No.	Waktu	LV	HV	MC	Volume (smp/jam)
1.	06:00 - 07:00	75	6	75,25	156,25
2.	07:00 - 08:00	146	13,2	119	278,2
3.	08:00 - 09:00	184	8,4	173,25	365,65
4.	09:00 - 10:00	191	6	168,5	365,5
5.	10:00 - 11:00	141	7,2	152,75	300,95
6.	11:00 - 12:00	121	6	169,25	296,25
7.	12:00 - 13:00	114	6	135,75	255,75
8.	13:00 - 14:00	109	9,6	118,25	236,85
9.	14:00 - 15:00	105	10,8	104	219,8

Dari table 3 tampak bahwa volume lalu lintas pada hari Senin terbagi atas tiga segmen yaitu untuk waktu pagi, siang dan sore yang memiliki waktu jam puncaknya masing-masing. Penentuan jam puncak ini bertujuan untuk memudahkan dalam penentuan waktu jam puncak pada jam-jam tertentu berdasarkan hasil perhitungan survey. Penentuan jam puncak dilakukan dengan cara memisahkan masing-masing segmen tiap 3 jam untuk mewakili waktu dari pukul 06:00 sampai 15:00 sehingga setiap segmen mempunyai waktu jam puncaknya masing-masing.

Data waktu jam puncak tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan data survey di lokasi penelitian. Dari hasil analisis diperoleh bahwa pada hari senin untuk waktu pagi jam puncak terjadi pada pukul 08:00-09:00 sebesar 365,65 smp/jam, waktu siang pada pukul 09:00-10:00 sebesar 365,5 smp/jam dan waktu sore terjadi pada pukul 12:00-13:00 sebesar 255,75 smp/jam. Data waktu jam puncak tersebut menunjukkan bahwa pada waktu pagi pukul 08:00-09:00 volume lalu lintas yang terjadi lebih besar dari pada di waktu siang dan sore. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut aktivitas di Pasar Sabo sudah mulai terjadi sehingga ikut mempengaruhi volume lalulintas di ruas Jalan Protokol Tabel 4. Pengembalian kuesioner

Tabel 2. Hasil uji validitas item 1 menggunakan SPSS 2013

Karakteristik Jalan	Jl. Protokol
Tipe Jalan	2/2 UD
Split Arah	50-50
Hambatan Samping	Tinggi
Lebar Bahu Jalan	1,5 meter
Lebar Jalan Efektif	7 meter
Lebar Jalan Perjalur	6 meter
Ukuran Kota	100.440 Jiwa 0,10044 Juta Jiwa

Pada penelitian ini, prosedur yang digunakan untuk menghitung dalam proses pengolahan data menggunakan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997).

$$C = C_o \times FC_w \times FC_{sp} \times FC_{sf} \times FC_{cs}$$

a) Menghitung Kapasitas Dasar (C_o). Karena jenis jalan yang disepakati adalah dua lajur tidak terbagi (2/2 UD) maka kapasitas jalan menurut MKJI 1997 adalah 2900 smp / jam. b) Menghitung Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalulintas (FC_w). Karena tipe jalan yang disepakati adalah dua lajur yang tidak terbagi, dan lebar lajur efektif jalan adalah 6 m, maka faktor penyesuaian lebar lajur (FC_w) yang digunakan adalah 0,87. c) Menghitung Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FC_{sp}). Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa kedua jalur tersebut membantu kendaraan melintas, sehingga menurut MKJI 1997 digunakan persentase 50% -50%, dan faktor penyesuaian pemisah arah (FC_{sp}) yang digunakan adalah 1,00. d) Menghitung Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FC_{sf}). Berdasarkan hasil survei, lebar bahu setiap lajur pada jalan kesepakatan adalah 1,5 m, dan gaya gesek lateral relatif besar, faktor penyesuaian gesekan lateral (FC_{sf}) yang digunakan adalah 0,90. e) Menghitung Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FC_{cs}). Dari data yang diperoleh Dinas Pelayanan Kependudukan tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Buton sebanyak 100.440 jiwa, dan faktor penyesuaian ukuran kota (FC_{cs}) yang digunakan sebesar 0,90. f) Menghitung Kapasitas (C) Ruas Jalan Protokol. Berdasarkan data di atas, kapasitas bagian ruas Jalan Protokol dapat dihitung sebagai:

$$C = C_o \times FC_w \times FC_{sp} \times FC_{sf} \times FC_{cs} \text{ (smp/jam)}$$

$$C = 2900 \times 0,87 \times 1,00 \times 0,90 \times 0,90 \text{ (smp/jam)}$$

$$C = 2043,63 \text{ smp/jam.}$$

Dari perhitungan tersebut maka dapat di katakan bahwa kapasitas ruas Jalan Protokol menurut MKJI 1997 adalah sebesar 2043,63 smp/jam.

Analisis kinerja jalan bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan (LoS- Level of Service). Tingkat pelayanan jalan merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh jalan dalam kondisi tertentu. Aspek yang mempengaruhi tingkat pelayanan jalan adalah kecepatan kendaraan, volume lalu lintas, kapasitas jalan dan gesekan lateral. Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi tingkat layanan secara langsung berkaitan dengan kegiatan penggunaan lahan dan perlintasan kereta api. Tingkat pelayanan jalan merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi operasi lalu lintas di jalan raya. Tingkat pelayanan jalan diperoleh dengan membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan (V / C).

Berdasarkan hasil analisis, maka tingkat pelayanan (LoS-Level of Service) jalan protokol adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Tingkat Pelayanan Jalan

No	Jam Puncak	Volume (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	V/C	TP
1.	Pagi	365,65	2043,63	0,178	A
2.	Siang	365,5		0,178	A
3.	Sore	255,75		0,125	A
4.	Total	328,96		0,160	A

Dari tabel 7 diperoleh bahwa pada hari Senin didapatkan nilai total rata-rata untuk volume kendaraan yaitu sebesar 328,97 dan kapasitas sebesar 2043,63 sehingga menghasilkan batas lingkup (V/C) yaitu sebesar 0,16. Berdasarkan hasil tersebut maka tingkat pelayanan di ruas Jalan Protokol menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) adalah A dengan karakteristik kondisi arus lalulintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalulintas rendah

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat diuraikan bahwa dari hasil survey mengenai kinerja ruas Jalan Protokol pada kawasan Pasar Sabho maka didapatkan volume lalulintas pada hari Senin, Kamis dan Minggu dimana hari tersebut mewakili hari dalam seminggu dan memiliki karakteristik pergerakan arus kendaraan yang berbeda-beda. Pengambilan data dilaksanakan mulai pukul 06:00-15:00 WITA dan dicatat untuk periode 15 menit. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian diperoleh beberapa data yaitu tipe Jalan Protokol adalah dua lajur tak terbagi (2/2 UD), maka menurut MKJI 1997, kapasitas dasar jalan adalah 2900 smp / jam, tipe jalan yang disepakati adalah dua lajur yang tidak terbagi, dan lebar lajur efektif jalan adalah 6m, sehingga faktor penyesuaian lebar lajur (FCw) kedua lajur tersebut adalah 0.87. Mereka semua berkontribusi pada arus lalu lintas kendaraan, sehingga menurut peraturan MKJI 1997 digunakan persentase 50% -50%, dan faktor penyesuaian jarak arah (FCsp) yang digunakan adalah 1,00, dan bahu setiap lajur dan sidebar jalan perjanjian. Lebar 1,5 m maka menurut MKJI 1997 nilai sidebar adjustment factor (FCsf) yang digunakan adalah 0,90. Dari data yang diperoleh dari pelayanan kependudukan tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Buton adalah 100.440, dan faktor penyesuaian ukuran kota (FCcs) digunakan Adalah 0,90. Dari data tersebut diatas maka diperoleh nilai kapasitas ruas Jalan Protokol pada kawasan Pasar Sabho berdasarkan aturan MKJI 1997 yaitu bernilai

sebesar 2043,63 smp/jam. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tingkat pelayanan pada hari Senin didapatkan nilai total rata-rata untuk volume kendaraan yaitu sebesar 328,97 dan kapasitas sebesar 2043,63 sehingga menghasilkan batas lingkup (V/C) yaitu sebesar 0,16 dengan tingkat pelayanan A. Pada hari Kamis didapatkan nilai total rata-rata untuk volume kendaraan yaitu sebesar 348,68 dan kapasitas sebesar 2043,63 sehingga menghasilkan batas lingkup (V/C) yaitu sebesar 0,17 dengan tingkat pelayanan A. Sedangkan pada hari Minggu didapatkan nilai total rata-rata untuk volume kendaraan yaitu sebesar 350,37 dan kapasitas sebesar 2043,63 sehingga menghasilkan batas lingkup (V/C) yaitu sebesar 0,17 dengan tingkat pelayanan A.

DAFTAR RUJUKAN

- Abshar, M. B., Aulia, S., & Kuswanto, N. (2020). *Pengaruh Aktivitas Pasar Terhadap Karakteristik Lalu Lintas Studi Kasus: Area Pasar Gedhe Surakarta*, Jurnal Desa-Kota : Universitas Negeri Semarang
- Adisatria, W., Ludfi, D., & Achmad W. (2015). *Manajemen Lalu Lintas Pada Kawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember*, Jurnal Rekayasa Sipil. Universitas Brawijaya.
- Anonymous. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indosia (MKJI)*. Dinas Pekerjaan Umum. Dirjen Bina Marga : Jakarta.
- Anonymous. (2014). *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI)*. Kementrian Pekerjaan Umum : Jakarta
- Anonymous. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Lalu Lintas*. Menteri Perhubungan : Jakarta.
- Anonymous. (2018). *Kota Baubau Dalam Angka*. BPS Kota Baubau : Baubau.
- Lalenoh, R. H. (2015). Analisa Kapasitas Ruas Jalan Sam Ratulangi Dengan Metode MKJI 1997 dan PKJI 2014, *Jurnal Sipil Statik*, No. 11, Vol. 3, 737-746.
- Miro, F. (2002). *Perencanaan Transportasi*. Erlangga : Jakarta.
- Mutiara, Ulfa. (2019). *Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Pasar Cendrawasih Kota Metro*. Digital Library : Politeknik Transportasi Darat Indonesia.
- Tamin, O.Z. (1997). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Edisi 2. ITB : Bandung.
- Tamin, O.Z. (2003). *Perencanaan & Pemodelan Transportasi : Contoh Soal dan Aplikasi*, Edisi Kesatu. ITB : Bandung.



Evaluasi Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Anna Atika Maghfiroh¹, Agus Sugiono^{2*}

annaatikamaghfiroh@gmail.com¹, agussugiono@uim.ac.id^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi

^{1,2}Universitas Islam Madura

Received: 12 02 2022. Revised: 06 04 2022. Accepted: 06 06 2022.

Abstract : The purpose of this study was to evaluate the preparation of the regional apparatus organization budget for the Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. This research is a qualitative research. Sources of data in the form of primary data obtained from observations and interviews with resource persons from the Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan and secondary data in the form of administrative document studies. The results showed that the process of preparing the budget planning at the Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan started from the proposal for the Puskesmas which was combined with the results of the MP-3 then combined with the proposals of various Sections and Sub-Sections to be submitted to the MP-3 at the Pamekasan Regency level. The goals of the health program at the Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan refer to the Draft Strategic Plan which contains the Vision, Mission, goals and objectives of the health program in 11 policy packages that serve as barometers for health development. The RASK proposal and the realization of the budget are RASK proposals that are in accordance with the priority scale in order to obtain an effective and efficient budget and it is necessary to advocate for policy makers, especially to Bapeda and TPA Legislative. The preparation of planning, determination and realization of the budget experienced problems in the quality and quantity of human resources at the Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

Keywords : Evaluation, Budgeting, Public health office

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penyusunan anggaran organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Jenis Penelitian ini kualitatif dengan Sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penyusunan perencanaan anggaran pada Dinas Kesehatan dimulai dari usulan Puskesmas yang dipadukan dengan hasil MP-3 kemudian disatukan dengan usulan berbagai Seksi dan Sub Bagian untuk diajukan pada MP-3 Tingkat Kabupaten. Tujuan sasaran program kesehatan mengacu pada Draft Renstra yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran program kesehatan yang ada pada 11 paket kebijakan dan menjadi barometer pembangunan kesehatan. Usulan RASK dan realisasi anggaran merupakan usulan RASK yang sesuai dengan skala prioritas, agar diperoleh anggaran yang efektif dan efisien dan diperlukan adanya advokasi terhadap penentu kebijakan terutama terhadap Bapeda dan TPA Legislatif. Selain itu

penyusunan perencanaan, penetapan dan realisasi anggaran mengalami kendala kualitas dan kuantitas SDM.

Kata Kunci : Evaluasi, Penyusunan anggaran, Dinas kesehatan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan adalah lembaga teknis daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui sekretariat daerah. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan (PP RI No.41, 1999). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan telah ditetapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati Pamekasan, 2016).

Undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut diatas didanai dari dan atas beban APBD, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Selain itu proses penyusunan anggaran pada OPD di Kabupaten Pamekasan diatur dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah

Tahun 2020 yang mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 (Bupati Pamekasan, 2020).

Dinas Kesehatan sebagai unit pelaksana teknis pemerintah kabupaten/kota menjadi lembaga tertinggi yang mengurus sektor kesehatan yang diserahkan ke daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab di sektor kesehatan di daerah, maka Dinas Kesehatan kabupaten harus memiliki kemampuan menjalankan fungsi-fungsi manajemen terutama fungsi perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan kesehatan dapat mencapai sasaran yang diharapkan (Trisnantoro, 2008). Dinas Kesehatan Pamekasan telah menyusun perencanaan dan penganggaran program setiap tahun. Sumber dana pembiayaan program dan kegiatan berasal dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana dekonsentrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan dana hibah dari Bank Dunia melalui proyek *Health Workforce Service* (HWS). Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2020 cenderung meningkat, namun peningkatan alokasi APBD untuk Dinas Kesehatan belum dapat mencukupi kebutuhan pembangunan kesehatan (Dinkes Pamekasan, 2020). Fenomena ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan tidak banyak berubah dari kondisi sebelum desentralisasi. Kondisi ini nampaknya jauh dari harapan kesepakatan bahwa 15% dari APBD digunakan untuk membiayai kesehatan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan diperoleh data bahwa penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan melalui beberapa tahap, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020. Tahap pertama dalam mekanisme Perencanaan Dinas Kesehatan adalah dengan menyusun Rencana Usulan Anggaran (RUK) yang meliputi usulan kegiatan wajib dan usulan kegiatan pengembangan. Penyusunan RUK Dinas Kesehatan harus memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku baik secara global, nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di Dinas Kesehatan. Dokumen pendukung yang dimaksud berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan perlu mempertimbangkan masukan dari Puskesmas. RUK harus dilengkapi pula dengan usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasarana dan operasional Dinas Kesehatan. RUK yang disusun merupakan RUK tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut disusun pada bulan Januari tahun berjalan (H), berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya (H-1), dan diharapkan proses penyusunan RUK

telah selesai dilaksanakan di Puskesmas pada akhir bulan Januari tahun berjalan (Dinkes Pamekasan, 2020)

RUK yang telah disusun dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya RUK Dinas Kesehatan yang terangkum dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten akan diajukan ke DPRD Kabupaten Pamekasan untuk memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, selanjutnya di serahkan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Adapun profil anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan adalah pada tahun 2017 sebesar Rp. 164.184.743.149,-, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.750.391.408,- . Begitu juga pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 202.929.386.351. Namun Pada tahun 2020 teraji penurunan menjadi Rp. 180.474.963.569,-. (Dinkes Pamekasan, 2020). Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan memaparkan hasil evaluasi penyusunan anggaran organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan tujuan utama membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif guna memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, di bidang keuangan dan penganggaran pada organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dalam rangka mengadakan perbaikan dan peningkatan penyusunan anggaran. Narasumber penelitian ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, meliputi Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder penelitian ini didapatkan melalui studi dokumentasi terkait dokumen administratif. Data Sekunder, berupa : (1). Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran (2). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan (3). Hasil Rapat Pembahasan Anggaran (4) Skala Prioritas Dinas Kesehatan (5). Arah Kebijakan Umum Dinas Kesehatan (6). Data Program Kerja Kesehatan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisi data mengacu pada konsep Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu : pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari pengemudi angkutan umum dan data sekunder berupa dokumentasi retribusi pembayaran, jurnal laporan keuangan dll. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada konsep Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu : pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada tahapan ini, data yang diperoleh dipilih dan diseleksi serta dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal pihak pelaksana peraturan daerah. Penelitian memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan aspek-aspek yang terkait dengan Penyusunan anggaran Dinas kesehatan Kabupaten Pamekasan. Pada tahapan ini peneliti akan menggunakan teknik yang telah dijelaskan yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya terkait dengan penyusunan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini dengan melaporkan hasil penelitian secara lengkap dan jelas terkait hasil evaluasi penyusunan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan, dimulai dari MP-3 Tingkat Kelurahan, MP-3 Tingkat Kecamatan dan MP-3 Tingkat Kabupaten dan semua mengacu pada Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang diimplementasikan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020. Prosedur penyusunan anggaran di Dinas kesehatan Kabupaten Pamekasan menurut pendapat informan dimulai dari usulan kegiatan 20 puskesmas dihimpun dan direvisi di Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk disatukan dalam usulan RASK Dinas Kesehatan dengan melibatkan pejabat struktural maupun fungsional Dinas Kesehatan. Kendala dalam penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan adalah kurangnya tenaga operator dan pengetahuan dalam memahami Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020. Perbedaan antara Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/dengan sebelumnya terutama pada struktur belanja dan koding.

Penyusunan anggaran TPA Eksekutif, pejabat struktural maupun fungsional dan pembahasan RASK oleh TPA Eksekutif sudah sesuai dengan Surat Edaran Bupati

Pamekasan. Sedangkan kendala yang dihadapi banyak isian format RASK yang tidak sesuai dengan pedoman, penerapan sistem lama masih dalam taraf belajar untuk saran kedepannya dengan diberlakukan peraturan baru format yang disusun dapat dipahami oleh semua SKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniasih (2017), bahwa penyusunan Anggaran dimulai dari MP-3 Tingkat Kelurahan, MP-3 Tingkat Kecamatan dan MP-3 Tingkat Kota dan semua mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2003.

Proses penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Pamekasan yang menjadi acuan adalah Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang diimplementasikan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan digunakan juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 yaitu dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3) Tingkat Kelurahan, MP-3 Kecamatan dan MP-3 Tingkat Kabupaten. Pembahasan RASK yang diperlukan RASK, DASK dan TOR dari Satuan kerja tetapi tidak semua usulan RASK mencantumkan TOR dan diharapkan untuk tahun yang akan datang satuan kerja dalam menyusun anggaran disertai dengan TOR terutama sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Pamekasan karena dapat terlihat seberapa jauh kemanfaatannya dan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Hasil dari wawancara juga menyatakan bahwa perlu diadakan sosialisasi internal Dinas Kesehatan dan rapat pembahasan penyusunan anggaran dalam menyiapkan rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut informan, agar proses penyusunan RASK dapat berjalan sesuai dengan ketentuan seharusnya peraturan-peraturan yang ada di dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 dapat dimengerti alur dan tahapan dalam penyusunan anggaran. Ini berpengaruh terhadap kebersamaan dan keberhasilan kerja tim (*teamwork*) atau kinerja tim perencana anggaran.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan telah memberikan bimbingan dan arahan berupa tahapan dan alur pikir dalam penyusunan anggaran. Saran yang akan datang, peraturan yang baru yaitu Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 cepat disosialisasikan kepada SKPD masing-masing. Namun, pembahasan usulan RASK Dinas Kesehatan belum adanya satu pemahaman dalam membuat panduan untuk penyusunan anggaran bagi satuan kerja. Apabila ada perubahan dalam pengisian format anggaran tidak

memberitahukan terlebih dahulu kepada Bagian Keuangan hal ini menimbulkan kebingungan dalam mengoreksi dan merevisi usulan RASK tersebut dengan kata lain diperlukan suatu kerjasama tim dan kesatuan visi bersama dalam melaksanakan proses penyusunan RASK.

Perbedaan antara Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 dengan yang sebelumnya terletak pada struktur belanja dimana untuk Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 aparatur dan pelayanan publik sedangkan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung juga pada jenis koding. Penerapan sistem Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 yang baru diterapkan pada Tahun 2021, sehingga SKPD termasuk Dinas Kesehatan masih dalam taraf belajar dan belum memahami betul tentang aturan tersebut.

Dinas Kesehatan berharap bahwa pemberlakuan peraturan baru hendaknya dilampiri dengan petunjuk tentang penyusunan anggaran sehingga mudah dipahami oleh SKPD yang ada di Kabupaten Pamekasan agar penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Widodo (2018), tentang penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang didapatkan bahwa terdapat keterlambatan usulan RASK yang masuk ke Bappeda. Meskipun keterlambatan usulan RASK di Kabupaten Pamekasan tidak terlalu meleset dari jadwal karena telah diantisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran lebih awal.

Hasil evaluasi penulis terhadap proses penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Pamekasan secara umum sudah cukup baik dan telah mengacu kepada Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang diimplementasikan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan digunakan juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait dengan kualitas SDM Dinas Kesehatan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Mulyadi (2015), dengan judul Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penerapan Anggaran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dokumen perencanaan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2011 inkonsisten dengan Renstra Dinas Kesehatan 2011-2015 karena program yang dilaksanakan pada dokumen RKA/DPA tidak mengikuti sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

Perencanaan tujuan sasaran program kegiatan Kesehatan yang mengacu pada draft Draft Renstra Dinas kesehatan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmawan,

(2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah bersumber APBD tahun 2016, dimana dalam menentukan perencanaan tujuan dan sasaran mengacu pada Renstra karena Skala Prioritas yang ada harus dapat mendukung visi dan misi dari Pemerintah Daerah sehingga ada kesesuaian antara skala prioritas dengan Rencana Strategis. Usulan program kegiatan yang diajukan oleh Puskesmas dengan format P2KT (Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu) dan dikirim ke Dinas Kesehatan melalui Bagian Perencanaan Dinas kesehatan Kabupaten Pamekasan selanjutnya diolah di Bagian Perencanaan untuk diajukan pada MP-3 Kabupaten sudah berbentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja. Meskipun mengacu pada Draft Renstra Dinas kesehatan, tidak semua usulan program kesehatan dalam MP-3 dapat dimasukkan dalam forum SKPD. Hal ini disebabkan karena karena terdapat pembahasan usulan program kegiatan tersebut berdasarkan skala prioritas. Usulan program kesehatan disusun berdasarkan skala prioritas kebermanfaatan dan mempunyai daya ungkit yang cukup tinggi.

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang diimplementasikan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan tentang penyusunan rancangan anggaran maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan melalui Sekretaris untuk mengoordinir penyusunan RKA. Kemudian setiap bidang berdasarkan Renja dan perencanaan yang telah ada menyusun RKA. RKA memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran yang telah ditentukan oleh TAPD. Namun dalam perjalanannya hanya enam puluh persen program dan kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2020 yang dapat terakomodir dalam RKA.

Penetapan skala prioritas dalam Perencanaan Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Pamekasan ini berkorelasi positif dengan penelitian Mulyadi, (2015) yang menyatakan bahwa bahwa Dokumen perencanaan, Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2011 inkonsisten dengan Renstra Dinas Kesehatan 2011-2015 karena terdapat beberapa program yang tidak muncul pada dokumen RKA/DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaan paket kebijakan sasaran program kesehatan selalu dievaluasi oleh tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai dasar dan tindak lanjut penyusunan program dan anggaran pada tahun berikutnya. Hasil kajian dan evaluasi Tim Penganggaran dan Perencanaan Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan 11 paket kebijakan Dinas

Kesehatan dapat dilaksanakan dengan hasil cukup baik, yaitu rata-rata ketercapaian program bervariasi 70-100%.

Hasil evaluasi penulis terhadap perencanaan tujuan sasaran program kesehatan sudah cukup baik dan telah mengacu pada Draft Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran program kesehatan yaitu 11 paket kebijakan yang menjadi barometer pembangunan kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait dengan koordinasi usulan program Dinas Kesehatan, baik internal Dinas Kesehatan maupun eksternal dengan Dinas lain dan legislatif.

Anggaran pada Dinas kesehatan disusun berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Saat ini berkembang paradigma baru mengenai penganggaran berbasis kinerja yang merubah paradigma lama bahwa penganggaran berbasis pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, serta meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Penganggaran suatu program dan kegiatan hendaknya memperhatikan perencanaan teknis maupun non teknis. Sebagai salah satu SKPD teknis, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dalam menghitung alokasi pagu anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan terlebih dahulu menyusun perencanaan teknis. Perencanaan ini tidak hanya menjadi pedoman penganggaran tapi juga menjadi tolok ukur prestasi kerja. Penyusunan anggaran perlu diperhatikan beberapa hal berikut, antara lain: stabilisasi, fungsi stabilisasi dari anggaran pemerintah daerah yang sifatnya terbatas. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat karena menyangkut kebijakan ekonomi makro suatu negara, seperti kebijakan fiskal dan moneter, inflasi dan pengeluaran dalam jumlah besar termasuk belanja negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian *distribusi*, fungsi ini menyangkut kebijakan distribusi pendapatan yang diharapkan dapat lebih merata termasuk di dalamnya kebijakan subsidi pemerintah untuk meringankan beban biaya masyarakat miskin. Selanjutnya *alokasi*, fungsi ini berupa pemindahan sebagian fungsi pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain.

Perencanaan (Renja) dan penganggaran (RKA) dapat dilakukan control melalui anggaran yang sedang berjalan. Di dalamnya terdapat bagaimana mengelola anggaran, apa

yang dibutuhkan, kendala yang ada, kontrol terhadap pengeluaran/penggunaan dana, dan evaluasi terhadap hasil yang pernah dicapai. Semua tahapan ini akan dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan penganggaran untuk satu periode berikutnya. Dengan demikian, diharapkan hasil yang diperoleh adalah terjadinya pengawasan yang lebih baik terhadap pengeluaran anggaran dan pendayagunaan dana yang ada secara optimal dengan memperhitungkan kendala yang ada.

Sementara dari segi sumber daya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi teknis dan minimnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak maksimal. Ditambah lagi perencanaan yang idealnya disiapkan satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan juga karena minimnya anggaran. Dari sisi sarana pendukung, pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menerapkan dan patuh terhadap peraturan perundangan yang ada. Berbagai aturan sudah dibuat dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran. Kendala yang ada pada proses penganggaran adalah anggaran yang diajukan setiap tahun disusun berdasarkan pada rutinitas yang selama ini telah dilaksanakan, sebagian informan mengatakan penyusunan anggaran untuk kegiatan dan program tidak berdasarkan standar biaya, dan salah satu informan mengatakan usulan anggaran masih berdasarkan dari besarnya anggaran program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Upaya yang ditempuh dalam proses penganggaran adalah menyediakan atau penganggarkan biaya rapat atau pelatihan untuk penyusunan anggaran kesehatan. Upaya lainnya adalah mengadakan koordinasi dan komunikasi intern Dinas Kesehatan juga pada TPA Eksekutif dan TPA Legislatif agar usulan di realisasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan anggaran kesehatan. Selain itu diperlukan juga upaya advokasi dan negosiasi terhadap penentu kebijakan terutama pada Bapeda dan TPA Legislatif agar usulan RASK dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan program kesehatan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penetapan anggaran, antara lain adalah uraian DASK yang ada pada waktu mengusulkan RASK Dinas Kesehatan belum disesuaikan dengan uraian kegiatan yang tercantum pada RASK sebelumnya. Kendala lain adalah kurangnya satu pemahaman dan satu persepsi antara TPA Eksekutif dalam pedoman RASK yang menjadi acuan untuk penyusunan RASK. Selain itu, adanya perubahan jenis anggaran tanpa adanya pemberitahuan kepada Sub Bagian Keuangan, mengakibatkan terjadinya kesalahan pada jenis kode rekening pada saat rekap usulan. Kendala lain dalam penetapan

anggaran adalah harga satuan yang tercantum dalam usulan RASK tidak disesuaikan dengan standar harga yang ada.

Upaya yang ditempuh dalam penetapan anggaran antara lain dalam penetapan anggaran diperlukan usulan RASK yang disusun berdasarkan skala prioritas dari Dinas Kesehatan tersebut agar tidak terjadi perubahan dalam penyusunan DASK sehingga perlu satu pemahaman antara TPA eksekutif. Oleh karena itu itu, sebaiknya antara Bappeda Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum agar sering mengadakan koordinasi. Solusi lain adalah jenis anggaran pada suatu kegiatan sebaiknya disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan program agar tidak terjadi perubahan jenis anggaran, serta perlunya ruangan khusus untuk verifikasi usulan RASK Dinas agar data bisa diakses di tiap masing-masing TPA Eksekutif. Kegiatan sosialisasi Petunjuk Teknis untuk TPA Eksekutif agar lebih dipahami agar dalam penandatanganan pengesahan DASK tidak mengalami keterlambatan.

Menurut Nordiawan, (2015), RKA sebagai bagian dari APBD disusun melalui perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di SKPD, mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan indikator dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan memerlukan perhatian khusus bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan korelasi antara anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang dianggarkan.

Proses pembahasan rancangan APBD oleh DPRD akan terdapat perubahan pada RKA yang meliputi lokasi kegiatan, volume/satuan dan alokasi anggaran. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi mengenai skala prioritas terhadap program dan kegiatan pembangunan. Menurut Kepala Sub Bidang keuangan, perubahan yang terjadi pada umumnya menyangkut berbagai asumsi yang tidak bisa disepakati oleh DPRD, misalnya mengenai asumsi target PAD, biasanya DPRD akan meminta asumsi target PAD lebih tinggi dari yang ditargetkan oleh pemerintah daerah.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap pengguna

anggaran (penyelenggara pemerintah) berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

RUK yang telah disusun dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya RUK Dinas Kesehatan yang terangkum dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten akan diajukan ke DPRD Kabupaten Pamekasan untuk memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, selanjutnya di serahkan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Adapun profil anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan adalah pada tahun 2017 sebesar Rp. 164.184.743.149,-, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.750.391.408,- . Begitu juga pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 202.929.386.351 . Namun Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp. 180.474.963.569 ,-. (Dinkes Pamekasan, 2020).

Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian Irdawati, (2017), dengan judul Evaluasi Anggaran APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016. Hasil penelitian anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe kurang efisien dan cukup efektif tetapi baik dalam pelaksanaan realisasi belanjanya. Program– program Kegiatan BAPPEDA Konawe Tahun Anggaran 2016 menunjukkan tingkat efektif dan efisiensinya sudah baik walaupun terdapat Program tidak efektif.

Hasil evaluasi penulis terhadap penganggaran dan penetapan anggaran Dinas Kesehatan sudah cukup baik dan melalui tahapan stabilisasi, distribusi dan alokasi berdasarkan skala prioritas. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Kesehatan serta peningkatan kreativitas dalam penganggaran terkait program inovasi kesehatan dan tidak hanya berdasarkan program rutin saja.

SIMPULAN

Proses penyusunan perencanaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dimulai dari usulan Puskesmas yang dipadukan dengan hasil MP-3 kemudian disatukan dengan usulan berbagai Seksi dan Sub Bagian di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk diajukan pada MP-3 Tingkat Kabupaten Pamekasan. (2). Hasil evaluasi terhadap proses penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Pamekasan secara umum sudah cukup baik dan telah mengacu kepada Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang

diimplementasikan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan digunakan juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait dengan kualitas SDM Dinas Kesehatan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan. (3). Tujuan sasaran program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengacu pada Draft Renstra yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran program kesehatan ada pada 11 paket kebijakan yang menjadi barometer pembangunan kesehatan. (4). Evaluasi terhadap perencanaan tujuan sasaran program kesehatan sudah cukup baik dan telah mengacu pada Draft Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran program kesehatan yaitu 11 paket kebijakan yang menjadi barometer pembangunan kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait dengan koordinasi usulan program Dinas Kesehatan, baik internal Dinas Kesehatan maupun eksternal dengan Dinas lain dan legislatif. (5). Penyusunan perencanaan, penetapan dan realisasi anggaran mengalami kendala SDM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, baik secara kuantitas dikarenakan kurangnya jumlah operator di puskesmas dan Dinas kesehatan, juga secara kualitas karena kurangnya sosialisasi terhadap perubahan regulasi yang baru. (6). Hasil evaluasi terhadap penganggaran dan penetapan anggaran Dinas Kesehatan sudah cukup baik dan melalui tahapan stabilisasi, distribusi dan alokasi berdasarkan skala prioritas. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Kesehatan serta peningkatan kreativitas dalam penganggaran terkait program inovasi kesehatan dan tidak hanya berdasarkan program rutin saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bupati Pamekasan. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*
- Darsono, (2016). *Akuntansi Manajemen*. Edisi kelima. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. (2020). *Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, Kabupaten Pamekasan*
- Halim. (2017). *Akuntanis Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi ke lima, Salemba Empat, Jakarta

- Harmawan. (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kesehatan Daerah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016*, Kabupaten Pontianak
- Husnawan. (2019). *Evaluasi Penyusunan Anggaran Pada RSUD Muntilan kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018*, Program Studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta
- Irdawati. (2017). *Evaluasi Anggaran APBD Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016*, Fakultas Ekonomi Universitas Lakidende
- Kurniasih, W. (2017). *Analisis Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari APBD Kota Tasikmalaya*, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang
- Makka Al Harry et all. (2015). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015
- Mardiasmo. (2017). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta
- Muliyadi. (2015). *Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja, pada Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur*, Magister Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kutai
- Nordiawan. (2015). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul 3 dari 5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN dan BPK*, Jakarta
- PP RI No.41. (1999). *Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Peraturan Pemerintah no. 41 tentang Pengendalian Pencemaran udara.*
- Robert, and Vijay. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 1. : Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sasongko dan Parulian. (2013). *Anggaran*, Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Simamora, Henry. (2012). *Akuntansi Manajemen*, edisi ke-3, Duri: Star Gate Publisher. Jakarta
- Silaban, Harefa. (2017). *Sistem Pengendalian Manajemen: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen*, Medan
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Supratman. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas Sistem pengelolaan Keuangan Propinsi DKI Jakarta*. Tesis. PPS-UGM Yogyakarta.
- Sutami. (2017). Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Singkawang, Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
- Trisnantoro, L. (2008). Bagaimana Strategi Pengembangan Sistem Surveilans Dalam Era Desentralisasi? *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 11(01).
- Widodo. (2018). *Analisis Kinerja Tim Perencana Anggaran Program Kesehatan Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes*. Brebes.



Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013 -2020

Syifa Fauziyyah^{1*}, Naf'an Tarihoran², Dedi Sunardi³
syifafauziyyah97@gmail.com^{1*}, nafan.tarihoran@uinbanten.ac.id²,
dedi.sunardi@uinbanten.ac.id³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Studi Ekonomi Syariah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Received: 15 05 2022. Revised: 22 05 2022. Accepted: 06 06 2022.

Abstract : This study aims to determine the effect of Gender Development Index, poverty rate and per capita expenditure against Human Development Index for the periode 2013 – 2020. Human development as the goal of economic development to improve the quality and welfare of people's lives. HDI measures the achievement of socio – economic development is reflected in the gender equality, prevention poverty and prosperity. The research method used is a quantitative method. Using secondary data obtained from BPS Banten Province. Data analysis used multiple linear regression analysis technique by fulfilling the classical assumption test with SPSS 23. The results showed that GDI had no significant effect on HDI. The relevance of GDI with HDI as a measure of development achievement, but GDI is not a factor that affect HDI. Poverty rate has a significant effect on HDI, because poverty is the cause of the disparity behind the low quality and productivity of the community. Per capita expenditure has a significant effect on HDI, because it is an indicator of measuring economic welfare. The variable of GDI, poverty rate, and per capita expenditure have a simultaneous effect on HDI and have an effect of 95,6 %. Gender in Islamic Economics guarantees the principle of equality. Poverty is the inability to meet material and spiritual needs. Per capita expenditure, namely economic activity based on the concept of islamic man and falah oriented. Human development as a sustainable comprehensive effort to improve well being.

Keywords : Gender development index, Poverty rate, Per capita expenditure, Human development index

Abstrak : Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten tahun 2013 – 2020. Pembangunan manusia sebagai tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat. IPM mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi yang tercermin dari kesetaraan gender, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, data penelitian sekunder serta analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda memenuhi uji asumsi klasik dengan SPSS 23. Hasil

penelitian menunjukkan IPG tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Relevansi IPG dengan IPM sebagai pengukur pencapaian pembangunan, namun IPG bukan faktor yang mempengaruhi IPM. Tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemiskinan mempengaruhi IPM dikarenakan kemiskinan penyebab disparitas yang melatarbelakangi rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat. Pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran perkapita mempengaruhi IPM dikarenakan sebagai indikator pengukur kesejahteraan ekonomi. Variabel IPG, tingkat kemiskinan dan pengeluaran perkapita berpengaruh secara simultan terhadap IPM dan memiliki pengaruh sebesar 95,6 %. Gender dalam ekonomi Islam menjamin prinsip persamaan derajat. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan material maupun rohani. Pengeluaran perkapita yaitu aktivitas ekonomi didasari konsep *Islamic man* berorientasi *falah*. Pembangunan manusia sebagai ikhtiar menyeluruh berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci: Indeks pembangunan gender, Kemiskinan, Pengeluaran per kapita, Indeks pembangunan manusia

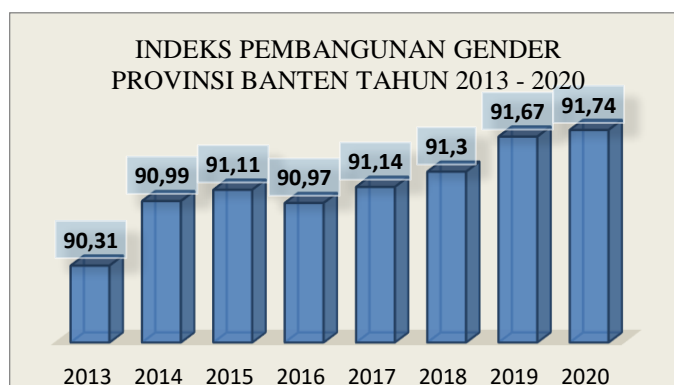
PENDAHULUAN

Provinsi Banten pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.904.562 jiwa, dengan sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 6.070.271 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.834.291 (BPS, 2020) Jumlah penduduk yang tinggi ini perlu diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadikan masalah yang menghambat pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten di tahun 2020 sebesar 72,45 % dalam kategori tinggi, dan Banten menduduki peringkat 8 Indeks Pembangunan Manusia secara nasional. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dicapai dengan mengukur dimensi-dimensi utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia diantaranya dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup utama yang harus dipenuhi. Kesehatan merupakan aspek utama yang perlu dipenuhi oleh setiap manusia (Murniati dkk, 2021).

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di seluruh dunia demi meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Agenda 2030 pembangunan berkelanjutan (SDGs, *the 2030 Agenda for Sustainable Development*) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendukung perbaikan menuju pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan hak asasi manusia yang harus dipenuhi serta kesetaraan yang bertujuan untuk pembangunan sosial, ekonomi serta lingkungan hidup (BPS, 2021). Permasalahan mengenai gender telah ramai diperbincangkan

oleh masyarakat luas, seperti (Megantara dan Prasodjo, 2021) membahas permasalahan ketidaksetaraan gender sebagai penyebab kerawanan pangan yang dialami rumah tangga petani agroforestri di Desa Sukaluyu. Masalah ketimpangan gender (Tamalene dkk, 2021) pun turut membahas dalam proses pembangunan ekonomi di era revolusi Industri 4.0 dengan melibatkan organisasi perempuan IWAPI Provinsi Maluku, ibu rumah tangga dan para perempuan pemilik usaha. Kemudian (Kusumawiranti, 2021) membahas pembangunan berkeadilan sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terkucilkan yang fokus utamanya ialah pengarusutamaan gender dan inklusivitas.

Menurut (Fitriyaningsih dan Faizah, 2020) gender merupakan perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari sosial budaya yang dapat berubah menurut waktu dan perkembangan zaman. Kesetaraan gender terkait dengan kesetaraan bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk memperoleh status yang sama untuk merealisasikan hak-hak dasar sebagai manusia, sehingga mampu berkontribusi penuh pada pembangunan nasional baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Permasalahan mengenai gender yang beredar di masyarakat yaitu berkaitan dengan peran perempuan yang hanya bertugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, sedangkan kaum laki-laki mengurus persoalan memperoleh pendapatan atau kegiatan publik lainnya (Fakih, 1996).



Gambar 1. Grafik Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan gender yang menggambarkan kelayakan hidup seperti pencapaian pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dengan memperhitungkan ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (BPS, 2019). Kriteria pencapaian pembangunan berbasis gender ini dilihat jika jarak angka IPG dengan nilai 100 semakin kecil maka semakin setara capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika semakin besar jarak

angka IPG dengan nilai 100, ini mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan kapabilitas antara kaum laki-laki dan perempuan.

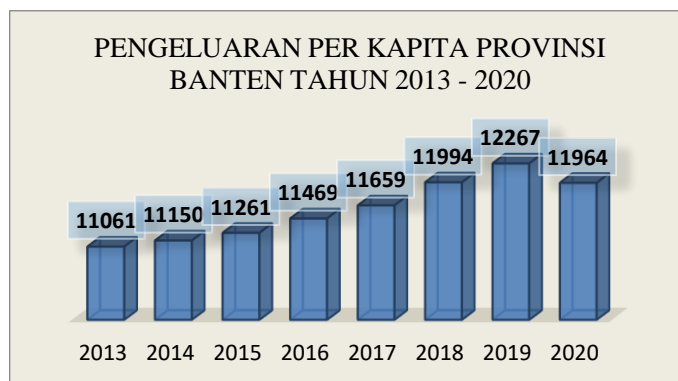
Berdasarkan grafik indeks pembangunan gender di atas, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2013 – 2020 di Provinsi Banten IPG mengalami fluktuasi. Angka IPG terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 90,31 dan angka IPG tertinggi pada tahun 2020 sebesar 91,47. Angka IPG yang mendekati 100 menyatakan bahwa pengakuan terhadap kapabilitas perempuan semakin meningkat. Namun dengan angka IPG kurang dari 100 ini menandakan memang masih terjadi kesenjangan dalam pencapaian kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan. Pembangunan manusia mengupayakan kehidupan bebas bagi masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan. Provinsi banten belum juga mampu keluar dari zona kemiskinan. Diketahui jumlah penduduk miskin di Banten pada tahun 2020 sebanyak 775.990 orang dengan presentase kemiskinan sebesar 5,92 % (BPS, 2020). Kemiskinan dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan yang disandang penduduk, ditambah dengan keterampilan masyarakat yang belum mendukung meningkatkan produktivitas. Kemiskinan terlihat dari kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan, seperti kekurangan gizi, air yang bersih dan sehat, perumahan atau tempat tinggal yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, serta tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2015).



Gambar 2. Grafik Kemiskinan Provinsi Banten

Berdasarkan grafik kemiskinan di atas, mendeskripsikan bahwa kemiskinan di Provinsi Banten mengalami fluktuasi dari tahun 2013–2020. Kemiskinan berhasil menunjukkan progres positifnya dengan turunnya tingkat kemiskinan dari tahun 2017 – 2019, namun di tahun 2020 kemiskinan meningkat sebesar 0,83 % menjadi 5,92 %. Kemiskinan di tahun 2020 menjadi tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten selama tahun 2013 – 2020. Meningkatnya kemiskinan di tahun 2020 disebabkan dampak dari pandemi Covid-19, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Pengeluaran per kapita sebagai acuan dalam melihat bagaimana rumah tangga mengeluarkan biaya untuk

memenuhi konsumsi rumah tangga baik untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan sehari-hari pada periode tertentu. Rata-rata pengeluaran per kapita dapat mencerminkan standar hidup layak yang dimiliki masyarakat dan juga menggambarkan membaiknya keadaan ekonomi masyarakat.



Gambar 3. Grafik Pengeluaran Per Kapita Provinsi Banten

Berdasarkan grafik pengeluaran perkapita di atas, pada tahun 2013 – 2019 pengeluaran per kapita meningkat disetiap tahunnya, ini menandakan bahwa daya beli masyarakat juga meningkat disetiap tahunnya. Namun di tahun 2020 dampak dari pandemi Covid-19 pengeluaran per kapita menurun menjadi Rp 11.964.000,- hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang berkurang sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal menarik karena pembangunan suatu bangsa itu diawali oleh pembangunan manusianya. Pembangunan manusia sebagai tujuan dari pembangunan ekonomi, maka kelayakan dan kesejahteraan hidup dapat dicapai sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang berguna untuk mendapatkan data dengan tujuan serta manfaat tertentu (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam perspektif ekonomi Islam studi kasus di Provinsi Banten periode tahun 2013 – 2020 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dengan landasan filsafat positivisme yang melihat bahwa suatu

gejala dapat diklasifikasikan, diamati, dihitung, bersifat bersifat kausalitas, relatif tetap serta bebas nilai (Sugiyono, 2017). Pada penelitian kuantitatif menekankan penelitian pada kumpulan data yang berasal dari populasi yang luas, sehingga meskipun populasi besar namun kumpulan data tersebut dapat mudah dianalisis dengan menggunakan statistika (Bungin, 2013).

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk di Provinsi Banten yang terkait dengan data Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita serta Indeks Pembangunan Manusia yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Menurut (Agung, 2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling total*, yaitu seluruh data pada 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten terkait dengan data Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan, pengeluaran per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten terhitung dari tahun 2013 – 2020.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan menggunakan analisis statistik inferensia, yaitu analisis statistik digunakan untuk menganalisis data sampel, hasilnya digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel itu diambil. Prosedur teknik analisis data sebagai berikut: Statistik deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Multikolinearitas. Analisis regresi adalah model analisis yang digunakan untuk menduga ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Analisis ini menguji seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini yaitu SPSS 23. Model analisis regresi liner berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

a = Konstanta

b = Koefisien garis regresi

X1 = Indeks Pembangunan Gender

X2 = Tingkat Kemiskinan

X3 = Pengeluaran per kapita

e = Standar error

Uji Hipotesis (Uji t parsial) bertujuan mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel dependennya. Kemudian Uji statistik simultan (Uji F) berfungsi menunjukkan apakah semua variabel independen (X_1, X_2, X_3) pada model regresi berganda berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Koefisien korelasi adalah angka yang menginterpretasikan kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Angka yang dihasilkan koefisien korelasi menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, nilai korelasi ($r = (-1 \leq 0 \leq 1)$). Koefisien determinasi (R^2) menginterpretasikan baik tidaknya model regresi yang terestimasi (Nachrowi dan Usman, 2006). Nilai koefisien determinasi menginformasikan nilai R^2 mengukur seberapa dekatkah dengan garis regresi yang terestimasi dengan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hasil penelitian kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hal ini dijelaskan dengan hasil analisis data secara parsial (Uji - t) yaitu nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,184 < 2,000$) dan tingkat signifikansi 0,241 atau lebih besar dari 0,05 ($0,241 > 0,05$). Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Uji data secara parsial yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia (t_{hitung} ($1,184$) $< t_{tabel}$ ($2,000$)) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari dkk, 2019) dengan judul "Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 – 2017 (Studi Kasus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah) menerangkan bahwa pembangunan gender sebagai indikator yang berperan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang dipengaruhi oleh ketimpangan pendidikan, kesehatan maupun ketenagakerjaan. Adapun kesesuaian penelitian ini dengan penelitian pembandingan yaitu fungsi dari IPG dan IPM adalah mengukur keberhasilan pembangunan, kedua indeks ini saling berhubungan namun bukan sebagai faktor yang saling mempengaruhi. Indeks

Pembangunan Gender pada dasarnya berfungsi sama dengan Indeks Pembangunan Manusia yaitu untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia, hanya saja IPG berfokus pada pembangunan gender.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hasil penelitian kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hal ini diketahui berdasarkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,376 > 2,000$) dan tingkat signifikansi $0,021$ atau lebih kecil dari $0,05$ ($0,021 < 0,05$). Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Penelitian (Ningrum dkk, 2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014 – 2018 dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil uji data secara parsial yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten ($t_{hitung} (2,376) > t_{tabel} (2,000)$ dan tingkat signifikansi ($0,021 < 0,05$)). Kemiskinan menjadi penyebab disparitas dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Sesuai dengan *human capital theory*, bagi Todaro manusia adalah modal dalam membangun suatu negara, pengukuran *human capital* dapat dihitung atau diukur melalui aspek pendidikan dan kesehatan yang berjalan beriringan. Berpengaruh secara signifikannya tingkat kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Banten ($t_{hitung} (2,376) > t_{tabel} (2,000)$ dan tingkat signifikansi ($0,021 < 0,05$)), menjelaskan bahwa kemiskinan menyebabkan terhambatnya seseorang mendapatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan juga kemiskinan melatarbelakangi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Proses pendidikan dan pelatihan dapat menambah nilai potensial diri sehingga memacu pertambahan produktivitas. Keahlian dan keterampilan juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kesehatan dan pendidikan juga mampu mengatasi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan yang memicu pada sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga menimbulkan keterisolasian.

Pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hasil penelitian kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hal ini diketahui berdasarkan t_{hitung} sebesar 19,957 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,957 > 2,000$) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Maka keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Sesuai dengan teori konsumsi Keynes bahwa pendapatan disposabel dapat mempengaruhi tingkat konsumsi saat ini, yaitu pengeluaran konsumsi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan (Ibrahim, 2016). Pola pengeluaran per kapita penduduk dipengaruhi pendapatan dan kebutuhan hidup masyarakat baik untuk makanan maupun non makanan, sehingga pola pengeluaran per kapita berbeda. Pengeluaran per kapita di setiap daerah itu beragam, seperti Kabupaten Lebak tercatat sebagai kabupaten dengan pengeluaran konsumsi untuk makanan terbesar di Provinsi Banten di tahun 2020 yaitu sebesar 58,87%.

Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hasil penelitian analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa secara simultan variabel Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten periode tahun 2013 - 2020. Hasil ini diketahui berdasarkan nilai $F_{hitung} > t_{tabel}$ ($431,039 > 3,15$) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Hubungan antara Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten periode tahun 2013 - 2020 adalah sangat kuat berdasarkan hasil uji data yang menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,978 dan memiliki pengaruh secara simultan sebesar 95,6 % sisanya sebesar 4,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor pengangguran, gini rasio, pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan,

pendapatan asli daerah, inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lainnya.

Gender, Kemiskinan, Pengeluaran Per Kapita dan Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Gender dalam konsep Ekonomi Islam memperbolehkan seorang perempuan melakukan aktivitas ekonomi seperti bekerja untuk memperoleh pendapatan dengan tetap memperhatikan ajaran Islam dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, hukum, kesusilaan, dan sosial. Peran perempuan bersifat multidimensi, menjadikan perempuan ikut terlibat dan berperan sebagai istri, ibu, pendidik hingga bekerja untuk memperoleh pendapatan. Sehingga perempuan harus dijaga dengan merefleksikan aturan agama diiringi norma-norma yang berlaku (Syihabudin, 2021). Kemiskinan merupakan kondisi yang secara alamiah terjadi, adanya orang kaya karena adanya orang yang tidak mempunya. Ekonomi Islam memberikan solusi untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan haknya seperti sedekah dan wakaf, serta memberikan bagian masyarakat miskin berupa zakat dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

Ekonomi Islam memandang pengeluaran per kapita sebagai sesuatu yang harus terjadi, karena manusia memiliki 3 kebutuhan diantaranya *ad-dhururiyah* (kebutuhan primer), *al hayyah* (kebutuhan sekunder) dan *at tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Pandangan ekonomi Islam terhadap pembangunan manusia yaitu sebagai ikhtiar yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt (Natadipurba, 2016). Manusia sebagai modal dasar pembangunan nasional sekaligus faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan suatu negara atau wilayah. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam merupakan keseimbangan antara unsur material dan spiritual, yaitu unsur dunia dan akhirat. Unsur-unsur ini akan membawa keberhasilan bagi manusia jika dilaksanakan secara utuh. Memakmurkan perekonomian nasional didukung oleh potensi besar modal manusia, karena seluruh ciptaan Allah Swt di bumi ini diperuntukan bagi kemaslahatan umat manusia. Maka dasar-dasar filosofis seperti *Tauhid Rububiyah*, keadilan, *khalifah* dan *tazkiyah*, serta unsur-unsur pembangunan ekonomi Islam perlu dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, relevansi IPG dengan IPM diketahui sebagai pengukur pencapaian

pembangunan, namun IPG bukan sebagai faktor yang mempengaruhi IPM. 2). Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, relevansi kemiskinan dapat mempengaruhi IPM dikarenakan kemiskinan sebagai penyebab disparitas yang melatarbelakangi rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat. 3). Pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, relevansi pengeluaran perkapita dapat mempengaruhi IPM dikarenakan pengeluaran perkapita sebagai indikator pengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. 4). Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, memiliki hubungan yang sangat kuat serta berpengaruh sebesar 95,6 % terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan sisanya sebesar 4,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 5). Pandangan ekonomi Islam mengenai pembangunan gender yaitu menjamin prinsip persamaan derajat atau memiliki kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada diskriminasi dan marginalitas antara keduanya. Adapun Ekonomi Islam memandang kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan baik kemiskinan atas kebutuhan material kemiskinan atas kebutuhan rohani. Pandangan ekonomi Islam mengenai pengeluaran perkapita yaitu aktivitas ekonomi masyarakat yang didasari konsep *Islamic man* yang berorientasi pada pencapaian *falah* yakni memaksimalkan kemaslahatan dalam kegiatan perekonomian. Kemudian ekonomi Islam memandang pembangunan manusia sebagai ikhtiar yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Anak Agung Putu. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2020* (Banten: BPS Provinsi Banten).
- Banten. (2021) *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2020*. Banten: BPS Provinsi Banten.
- BPS. (2021). *Sensus Penduduk 2020*, Badan Pusat Statistik, 2021, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Fakih, M. (1996). *Analisis gender & transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fitriyaningsih, P. D. A., & Faizah, F. N. (2020). Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Al-Maiyyah*, 13(1).
- Ibrahim, Z. (2016). *Pengantar Ekonomi Makro*. Serang: Koperasi Syariah Baraka.
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *POPULIKA*, 9(1), 12-19.
- Megantara, F. S., & Prasodjo, N. W. (2021). Analisis Gender Pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Agroforestri. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(4), 577-596.
- Murniati, N., Rimbani, R. M., & Mawaddah, U. (2021). Keberhasilan Program Subsidi Kesehatan Terhadap Alokasi Biaya Kesehatan Keluarga Miskin: Studi Pada Penerima Bantuan Iuran Di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(1), 12-21.
- Nachrowi, D, dan Hardius Usman.(2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Natadipurba, Chandra. (2016). *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT. Mobidelta Indonesia.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Sari, Risky Puspita, Sudati Nur Sarfiah, dan Lucia Rita Indrawati. (2019). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 - 2017 (Studi asus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah). *DINAMIC: Directory Journal of Economic* Vol. 1, no. 4.
- Sugiyono. (2015). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Syihabudin. (2021). "Gender dalam perspektif Ekonomi Islam". *Hasil Wawancara Pribadi*: 07 Oktober 2021, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Tamalene, A., Sandanafu, S. P., & Matitaputty, M. S. (2021). Pembangunan Ekonomi Berwawasan Gender. Masihkah Berlaku Di Era Revolusi Industri 4.0 (Sebuah Perspektif Sosial Ekonomi). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1931-1940.



Implementasi Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Purbalingga

Aning Fitriana

aningfv@gmail.com

Program Studi Akuntansi

Universitas Perwira Purbalingga

Received: 19 05 2022. Revised: 06 06 2022. Accepted: 20 06 2022.

Abstract : This aims of this research is to provide evidence regarding the implementation of SAK EMKM. This research is a qualitative descriptive research, the data collected through questionnaires. The object of the research is the MSME business actors in Purbalingga district as a provider of accounting information as many as 100 respondents. The purpose of the research is to describe and analyze the understanding of MSME actors on the implementation of Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) in Purbalingga district. The results of this study indicate that business actors quite agree with the application of SAK EMKM to reports, business actors do not fully know SAK EMKM, and the use of accounting information in financial statements is still low.

Keywords: UMKM, SAK EMKM, Financial Statement

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti mengenai implementasi SAK EMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner Objek dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha UMKM kabupaten Purbalingga sebagai penyedia informasi akuntansi sebanyak 100 responden. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pemahaman pelaku UMKM atas implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaku usaha cukup setuju dengan adanya penerapan SAK EMKM terhadap laporan, Pelaku usaha belum sepenuhnya mengetahui SAK EMKM, dan masih rendahnya penggunaan informasi akuntansi terhadap laporan keuangan.

Kata Kunci: UMKM, SAK EMKM, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus didukung dan mendapat perlindungan oleh pemerintah. UMKM sendiri mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDB di Indonesia yaitu 60,34% (Rohendi, 2019). Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki andil yang cukup besar bagi daerah juga memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 97%. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM.

Permasalahan yang dihadapi seperti kurang dukungan pemerintah yang tidak memadai, serta birokrasi dan perubahan kebijakan yang sering tak terduga. Adanya pergerakan pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan melihat informasi keuangan sebagai salah satu indikatornya. Sehingga informasi keuangan harus mampu menghasilkan informasi yang andal dalam arti harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan disesuaikan juga dengan perkembangan usaha yang dijalani para pelaku UMKM, sebagai kewajiban untuk menyediakan informasi atau laporan keuangan sesuai standar (Dewi, 2017). Laporan keuangan dapat dibuat dengan mempelajari ilmu akuntansi sehingga peranan ilmu akuntansi menjadi penting untuk keberhasilan suatu bisnis. Pada laporan keuangan yang dibuat memuat berbagai macam informasi seperti aliran dana masuk atau keluar, aset, kewajiban, pajak serta modal, secara keseluruhan harus dicatat, dianalisis dan dievaluasi agar nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan usaha (Pardita et al., 2019).

Pentingnya laporan keuangan dibuat juga menjadi salah satu syarat untuk dapat mengajukan pinjaman kepada pihak bank agar dapat memperoleh tambahan modal. Namun sering kali kita temui bahwa pelaku UMKM tidak dapat membuat laporan keuangan karena mereka belum terbiasa untuk melakukan pencatatan dan penyusunan gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan (Purwati et al., 2018). Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi merupakan sesuatu permasalahan yang ditemui oleh pelaku UMKM hal ini menjadi kendala. Menurut (Hetika, 2017) bahwa kendala yang sering dihadapi pelaku UMKM karena masih rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan terhadap teknologi informasi, Sumberdaya manusia yang masih kurang kompeten, dan juga lingkungan usaha yang masih tergolong kecil. Pada penelitian (Diajeng & Andrianto, 2019) membuktikan terdapat beberapa UMKM yang telah menyusun laporan keuangan berdasarkan kas masuk dan keluar hingga membuat laporan keuangan sederhana namun masih belum mencantumkan beban pajaknya. Persentase pemahaman pelaku UMKM membuat laporan keuangan masih rendah dengan diperkuat dengan berbagai macam permasalahan diatas.

Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro dan Menengah akan mulai diaktifkan per 1 januari 2018. Hal ini tidak lepas dari peran organisasi profesi akuntan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Nantinya Standar tersebut diharapkan mampu membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan. Standar SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang dianggap lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP misalnya dilihat dari sisi ED SAK EMKM menggunakan dasar

pengukuran biaya historis sehingga pencatatan dicatat sebesar biaya perolehannya. Diharapkan munculnya standar baru akan menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang sedang berupaya untuk mendukung perkembangan dunia UMKM terlebih dimasa pandemic ini. Pada tahun ini BUMD Pemkab Purbalingga akan menggelontorkan sejumlah Uang untuk pembiayaan kepada UMKM sekitar 1,2 M tentu ini merupakan komitmen untuk kemajuan dan perkembangan UMKM di Purbalingga. Penyaluran kredit ini membutuhkan persyaratan seperti halnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui tentang apakah sudah diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi dan metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. (Ghozali, 2018). Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah literasi pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM, pengetahuan SAK EMKM, penerapan SAK EMKM dan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di Kabupaten Purbalingga. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience sampling*, yaitu prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti (Sugiyono, 2007) Teknik ini dilakukan karena jumlah UMKM yang relatif banyak di Kabupaten Purbalingga.

Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh UMKM yang ada di Purbalingga menggunakan data BPS tahun 2020 Yaitu 96780. Untuk menentukan ukuran sampel dilakukan metode dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Berdasarkan formulasi tersebut diatas, maka dapat ditentukan besarnya jumlah sampel penelitian, dengan penghitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{96780}{96780 (0,01)^2 + 1}$$

$$n = 99,89$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 98,89 dibulatkan menjadi 100 pelaku usaha UMKM . Untuk memperoleh data, penulis menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada 100 Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Purbalingga. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode tabulasi data, display data dan kategori data. Data yang telah diolah disajikan juga dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian yang sistematis logis dan rasional sesuai dengan urutan dan posisi kepentingan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean). Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa jawaban dari responden terhadap variabel penerapan SAK EMKM memiliki nilai tertinggi 30 yang berarti bahwa responden dengan total skor setuju untuk penerapan SAK EMKM sedangkan nilai terendah berarti responden 12 indikasi responden tidak setuju dengan adanya penerapan SAK EMKM. Nilai rata-rata 20 dibagi dengan 6 butir pertanyaan diperoleh rata-rata jawaban 3,3 yang menunjukkan cukup setuju dengan adanya penerapan SAK EMKM terhadap laporan keuangan. Penelitian menggunakan skala likert 5 tingkatan dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), cukup setuju(3), setuju (4) dan sangat setuju(5). Diharapkan pelaku usaha dapat merancang sistem untuk mempermudah penerapan SAK EMKM.

Tabel 1. Responden informasi akuntansi

Variabel	Minimum	Maximum	Mean
Penerapan SAK EMKM	12	30	20
Penggunaan Informasi Akuntansi	12	30	18
Pengetahuan SAK EMKM	6	30	16

Hasil yang didapat pada penggunaan informasi akuntansi memiliki nilai tertinggi 30 dengan total skor tersebut maka responden setuju menggunakan informasi akuntansi, dan nilai

terendah 12 mengindikasikan responden tidak setuju menggunakan informasi akuntansi dan dilihat pada nilai rata-rata 18 apabila dibagi dengan 6 butir pertanyaan maka diperoleh rata-rata jawaban pada 3 skala (cukup setuju) Hal ini membuat penggunaan informasi akuntansi bagi pelaku usaha dianggap cukup penting terhadap laporan keuangan. Jika penggunaan informasi akuntansi semakin baik maka para pelaku usaha akan memiliki pemahaman tentang literasi SAK EMKM juga bisa baik. Hal ini sejalan pada penelitian (Purwati et al., 2018) bahwa jika pelaku usaha memahami akuntansi maka akan mendapat kemudahan dalam pengajuan kredit maupun pembuatan laporan keuangan. Pentingnya pelaku UMKM untuk mengelola keuangan hingga dapat membuat laporan keuangan hal ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan strategis mengenai perkembangan dari usahanya.

Hasil pada variabel pengetahuan SAK EMKM memiliki nilai tertinggi 30 hal ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM sudah menyetujui SAK EMKM namun pada nilai minimum hanya 6 dengan kesimpulan belum mengetahui SAK EMKM. Variabel ini memiliki rata-rata 2,6 yang dapat disimpulkan mereka tidak mengetahui SAK EMKM digunakan sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan mengenai Laporan keuangan dengan standar EMKM masih kurang hal ini dikarenakan faktor SDM, dan tingkat kompetensi. Berdasarkan pada pembahasan diatas bahwa pelaku UKM masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan melalui siklus akuntansi sehingga peneliti membuat format buku catatan single entri agar dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kami membuat format sederhana untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM di Kab. Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 2. Buku/Catatan Utang

Nama Kreditur/Pemasok :

Alamat:

No Hp.:

Tanggal		Keterangan	No Ref	Debet (-)	Kredit (+)	SALDO
Mei	1	Saldo		-	-	Rp. xxxxx
	2	Pembelian		-	Rp. xxxxx	Rp. xxxxx
	5	Pembayaran		Rp. xxxxx	-	Rp. xxxxx

Tabel 3. Buku/Catatan Piutang

Nama Debitur/Customer :

Alamat :

No Hp. :

Tanggal		Keterangan	No Ref	Debet (+)	Kredit (-)	SALDO
Mei	1	Saldo		-	-	Rp. xxxxx
	2	Penjualan		Rp. xxxxx		Rp. xxxxx
	5	Pelunasan			Rp. xxxxx	Rp. xxxxx

Tabel 4. Buku kas

Periode :

Tanggal		Keterangan	No Ref	Debet (+)	Kredit (-)	SALDO
Mei	1	Saldo		-	-	Rp. xxxxx
	2	Pemasukan		Rp. xxxxx	-	Rp. xxxxx
	5	Pengeluaran		Rp. xxxxx	-	Rp. xxxxx

Tabel 4. Buku Inventaris Aset

Jenis barang	Harga Perolehan	Ket tanggal P	Masa manfaat	Nilai sisa akhir periode
xxx	Rp. xxxxx	10 Mei 2021	4 tahun	Rp. xxxxx
Jumlah	Rp. xxx			Rp. xxxxx

Tabel 5. Buku Penjualan/Penghasilan

Tanggal		Keterangan Penjualan	Jumlah
Mei	1	Saldo	Rp. xxxxx
	2	Nama Customer	Rp. xxxxx
	30	Jumlah	Rp. xxxxx

Tabel 6. Buku Biaya

Tanggal		Keterangan (Biaya-biaya)	Jumlah
Mei	1	Saldo	Rp. xxxxx
	2	Jenis biaya yg dikeluarkan....	Rp. xxxxx
	30	Jumlah	Rp. xxxxx

Tabel 7. Persediaan bahan baku/Stock

KET	MASUK			KELUAR			SALDO/SISA		
	QTY	harga	Jml	QTY	harga	Jml	QTY	Harga	Jml
xxx	xxx	xxx	xxx				xxx	xxx	xxx
xxx				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Penyusunan Laporan keuangan ini dapat dimulai dengan adanya bukti transaksi dilanjutkan dengan membukukan transaksi tersebut sesuai dengan kategorinya seperti diatas. Pada umumnya pencatatan ini akan ditulis dalam dua kategori semisal ketika mencatat transaksi kas keluar masuk maka segera di catat di dalam buku kas namun juga dicatat kedalam buku lainnya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Semua transaksi dicatat dalam

satu periode berdasarkan kategori sehingga nantinya akan dapat menyusun harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang sudah ada dapat dilanjutkan untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dengan mempostingnya dari nominal akhir dari masing-masing buku catatan yang ada. Berikut ini format untuk menyusun laporan keuangan Yuliati (2019).

Nama usaha....		
Laporan L/R		
Untuk periode yang berakhir Mei 2022		
Penjualan Barang		Rp. xxxxx
Potongan Penjualan Barang	(Rp. xxxxx)	
Retur penjualan	(Rp. xxxxx)	
Total Pendapatan		Rp. xxxxx
Persediaan Barang Jadi (Awal)	Rp. xxxxx	
Harga Pokok Produksi	Rp. xxxxx +	
Barang tersedia untuk dijual	Rp. xxxxx	
Persediaan Barang Jadi (Akhir)	Rp. xxxxx	
Harga Pokok Penjualan		Rp. xxxxx -
Laba Kotor		Rp. xxxxx
Biaya Usaha		
Biaya Gaji	Rp. xxxxx	
Biaya dll	Rp. xxxxx	
Jumlah Biaya Usaha		Rp. xxxxx
Pendapatan Dan Biaya Lainnya		
Pendapatan Lain-lain	Rp. xxxxx	
Biaya Lain-lain	Rp. xxxxx	
Total Pendapatan dan biaya Lain-lain		Rp. xxxxx
Total Laba Bersih sebelum Pajak		Rp. xxxxx

Nama Usaha.....			
Laporan Posisi Keuangan			
30 Mei 2022			
ASET		LIABILITAS & EQUITY	
		Liabilitas	
Kas	Rp. xxx	Utang Jk Pendek	
Bank	Rp. xxx	Utang usaha	Rp. xxx
Piutang usaha	Rp. xxx	Pendapatan diterima dimuka	Rp. xxx
Perlengkapan	Rp. xxx	Utang pajak	Rp. xxx
Beban dibayar dimuka	Rp. xxx	Jumlah Utang JK pendek	Rp. xxx
Persediaan bahan baku		Utang Jk Panjang	
Persediaan dll		Utang Bank	Rp. xxx
Jumlah Aset Lancar	Rp. xxx	Jumlah Utang JK Panjang	Rp. xxx
Aset Tetap	Rp. xxx		
Tanah	Rp. xxx	Jumlah Liabilitas	
Bangunan	Rp. xxx	Ekuitas :	

Akm Penyusutan Bangunan	Rp. xxx	Modal Tn A	Rp. xxx
Peralatan	Rp. xxx	Modal Tn B	Rp. xxx
Akm Penyusutan Peralatan	Rp. xxx	Saldo Laba/Rugi	Rp. xxx
Mesin	Rp. xxx	Jumlah Ekuitas	Rp. xxx
Akm Penyusutan Mesin	Rp. xxx		
Jumlah Aset Tetap	Rp. xxx		
Jumlah Aset	Rp. xxx	Jumlah Liabilitas dan ekuitas	Rp. xxx

Laporan posisi keuangan disusun seperti diatas dan selanjutnya pelaku UMKM dapat membuat catatan atas laporan keuangan yang memuat dengan prinsip serta kebijakan penyajian yang berlaku sesuai dengan Standar SAK EMKM, berisi ringkasan keuangan dan informasi tambahan yang dianggap penting untuk dijadikan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis mengenai pemahaman atas implementasi standar akuntansi keuangan UMKM di kab. Purbalingga. Hasil penelitian ini memberikan bukti mengenai pemahaman pelaku Usaha terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAKM EMKM). Disamping itu penelitian ini memberikan bukti mengenai pemakaian informasi akuntansi masih belum maksimal. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey kepada 100 UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kesimpulan ketiga yaitu pelaku usaha tidak mengetahui SAK EMKM sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan.

Mengacu pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM yang ada di Kab. Purbalingga masih sederhana, umumnya menggunakan single entry dan belum terintegrasi. SAK EMKM masih belum dipahami oleh para pelaku UMKM dimana hanya mencapai skor 2,67 dari skor ideal yakni 5,0. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM baru sebatas buku catatan kas masuk dan keluar, buku utang, buku piutang dan buku tambahan lainnya tetapi belum terintegrasikan dengan baik sehingga tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar EMKM. Mengacu pada hasil kuesioner, interview dan observasi dokumen transaksi yang ada maka dapat disusun laporan keuangan *single entry* yang tetap dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar EMKM.

Pencatatan akuntansi pada kenyataannya masih menjadi hal yang sulit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, J. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17.
- Diajeng A Z Rachmanti, H., & Andrianto. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. *Jurnal Balance*, 16(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hetika, N. M. (2017). Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 259–266
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Pardita, I. W. A., Julianto, I. P., & Kurniawan, P. S. (2019). Pengaruh Tingkat Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Tingkat terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM Kab. Gianyar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 286–297.
- Purwati, A. S., Suparlinah, I., & Putri, N. K. (2018). Analisis Pemahaman Literasi Pelaku UMKM atas Implementasi Standar Akuntansi Keuangan ENtitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di Kabupaten Banyumas. *Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjuta VIII*, 73–81.
- Rohendi, H. (2019). Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Mikro, kecil, dan Menengah (SAK EMKM). *Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*, 86–98.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. (Cetakan Ke3).Bandung: Alfabeta.